



# **RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017-2022**





**DINAS KETAHANAN PANGAN**

**KABUPATEN BULELENG**

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja ; Tlpn. (0362) 24457

Website: [dkp.bulelengkab.go.id](http://dkp.bulelengkab.go.id)

E-Mail : [dkp@bulelengkab.go.id](mailto:dkp@bulelengkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat rahmat - Nya Penyusunan Restra ( Rencana Strategis ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat kami selesaikan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini diwajibkan sebagai tindaklanjut dengan telah di terbitkannya Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Periode 2017-2022.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Kabupaten Buleleng yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sehingga tujuan dan sasaran program/kegiatan dapat lebih fokus, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan . Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini diharapkan dapat memberikan acuan dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga yang berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa selalu memberikan sinar suci-Nya atas usaha kita semua dan semoga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buleleng.

Singaraja, 11 Juni 2018

**Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Buleleng,**



**drh. Nyoman Surya Temaja, MP**

Pembina Utama Muda, IV/C

NIP. 19591207 199003 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv

### BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	6
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	8

### BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

#### KAB. BULELENG

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	10
2.2. SUMBER DAYA .....	32
2.3. KINERJA PELAYANAN .....	36
2.4. TANTANGAN DAN PELUANG .....	58

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	60
3.2. TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH.....	61
3.3. TELAHAH RENSTRA BADAN KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI .....	64
3.4. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	68
3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS .....	69



#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	73
---	----

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	76
---------------------------------------	----

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	79
6.2. KELOMPOK SASARAN .....	81
6.3. RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	82

#### **BAB VII. INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG**

##### **MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2017-2022**

7.1. INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN .....	93
7.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	94

#### **BAB VIII. PENUTUP .....**

	98
--	----



## DAFTAR TABEL

NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel. 2.1 : Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan .....	33
Tabel. 2.2 : Jumlah Pegawai Kontrak Berdasarkan Jenjang Pendidikan .....	34
Tabel. 2.3 : Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan .....	35
Tabel. 2.4 : Kinerja Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2012-2016..	36
Tabel. 2.5 : Perkembangan Produksi Komoditi Pangan .....	38
Tabel. 2.6 : Ketersediaan Energi dan Protein Pada Masing-Masing Komoditi Pangan.....	39
Tabel. 2.7 : Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017 .....	40
Tabel. 2.8 : Skor PPH Ketersediaan Tahun 2017 .....	40
Tabel. 2.9 : Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditi Pangan Tingkat Pedagang Eceran.....	41
Tabel. 2.10 : Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditi Pangan Tingkat Pedagang Grosiran .....	42
Tabel. 2.11 : Harga Pangan Strategis Tahun 2017 .....	43
Tabel. 2.12 : Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat LPM Tahun 2012-2017 .....	44
Tabel. 2.13 : Cadangan Pangan Masyarakat .....	45
Tabel. 2.14 : Nama Kelompok LPM Tahun 2017 .....	45
Tabel. 2.15 : Cadangan Pangan Pemerintah .....	46
Tabel. 2.16 : Data Penggilingan Padi Tahun 2017 .....	46
Tabel. 2.17: Jumlah PUPM Tahun 2012 – 2017 .....	48
Tabel. 2.18: Nama Kelompok PUPM .....	49
Tabel. 2.19 : Jumlah Toko Tani Indonesia Tahun 2017 .....	49
Tabel. 2.20 : Nama Kelompok TTI .....	49
Tabel. 2.21 : Konsumsi Pangan Ideal dan Skor PPH .....	50
Tabel. 2.22 : Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2017 .....	51
Tabel. 2.23 : Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Tahun 2016-2017 ..	52
Tabel. 2.24 : Skor PPH Konsumsi Tahun 2017 .....	52



Tabel. 2.25 : Data Konsumsi Tahun 2017 .....	53
Tabel. 2.26 : Lokasi Kegiatan Pengembangan KRPL Tahun 2017 .....	54
Tabel. 2.27 : Jenis Tanaman Pangan KRPL .....	55
Tabel. 2.28 : Persentase Pangan Aman .....	57
Tabel. 2.29 : Jumlah Kasus Penyakit yang di sebabkan oleh pangan.....	58
Tabel. 3.1 : Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah .....	62
Tabel. 3.2 : Target Kinerja Program BKP Pusat Tahun 2015-2019 .....	66
Tabel. 3.3 : Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng Terhadap Sasaran Renstra BKP Kementerian Pertanian RI .....	67
Tabel. 4.1 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DKP Tahun 2017-2022 .....	75
Tabel. 6.3 : Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2017-2022 .....	83
Tabel. 7.1 : Indikator Kinerja DKP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 .....	94
Tabel. 7.2 : Indikator Kinerja Utama DKP Tahun 2017-2022 .....	95



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 adalah merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Seiring dengan telah disusunnya RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng perlu menyelaraskan dokumen lima tahunan Dinas Ketahanan Pangan yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan dan penanganan daerah rawan pangan, pemantapan distribusi pangan dan cadangan pangan, percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengawasan keamanan pangan. Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan untuk periode 2017-2022 dicanangkan **Visi** Pembangunan Kabupaten Buleleng sebagai berikut : ” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**” Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub



sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem panganekaragaman konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan (d) sub sistem keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan

Untuk mewujudkan Visi, **Misi** berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun **Misi** pembangunan Kabupaten Buleleng untuk 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas.
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan.
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik.
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development).

Pemerintah Kabupaten Buleleng terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu ( integrated ), terukur keberhasilannya ( measureable ) dan berkesinambungan ( sustainability ). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017–2022.

Kabupaten Buleleng sebagai daerah agraris dan bahari yang posisinya nyegare gunung, memiliki hutan rakyat yang cukup luas dengan keragaman hayati yang sangat tinggi. Hal ini merupakan modal dasar yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun demikian keberhasilan pembangunan ketahanan pangan

tidak hanya ditentukan oleh potensi sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan, tetapi juga sangat ditentukan oleh peran serta masyarakat dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang mendukung dalam pengelolaannya baik ditingkat on farm maupun off farm. Pada tingkat on farm peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan perlu terus didorong untuk dapat meningkatkan produksi pangan, guna menjamin ketersediaan pangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk. Pada tingkat off farm sistem distribusi pangan perlu penataan kembali sehingga menjamin seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Selain itu pola konsumsi masyarakat perlu terus didorong untuk mengikuti pola pangan harapan (PPH) yang memenuhi kaidah hidup sehat, baik mutu, keragaman, kandungan gizi dan keamanannya serta tidak bertumpu pada satu komoditi pangan tertentu (beras).

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan lima tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan acuan dalam menyusun rencana kerja satu tahun Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Proses penyusunan Renstra SKPD demikian ini mencerminkan adanya kerangka pikir komprehensif dan terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena dalam penyusunannya telah melakukan berbagai pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan berbasis kinerja), perencanaan diawali dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh tentang kinerja pembangunan lima tahun terakhir dan identifikasi kondisi saat ini maupun lima tahun ke depan, baik mengenai sumberdaya internal maupun lingkungan eksternal serta permasalahannya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis sehingga diketahui kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan (threats). Berdasarkan analisis tersebut dapat dirumuskan kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif, perencanaan melibatkan peran serta berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan pangan. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan Renstra, yang dilakukan secara transparan dan

akuntabel akan menghasilkan konsensus atau kesepakatan terhadap perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, kebijakan dan strategi serta prioritas program dan kegiatan.

3. Pendekatan Politis, perencanaan mengacu pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
4. Pendekatan Top Down, perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/kerja, mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, sehingga terjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Pendekatan Bottom Up, perencanaan dilaksanakan dengan menampung aspirasi dari masyarakat secara partisipatif kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, sehingga terjamin terciptanya perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati /Wakil Bupati terpilih, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng dan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng harus mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selama 5 tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Berikut disajikan mekanisme/tahapan dan tata cara penyusunan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

The flowchart illustrates the process of formulating the RPJMD (Regional Medium-Term Development Plan) from 2015 to 2019. It is divided into four main stages:

- Persiapan Penyusunan Renstra-PD (Preparation of Renstra-PD Formulation):** This stage involves the preparation of the initial draft. It includes:
  - Penelaahan RTRW & KLHS (Review of RTRW & KLHS):** Reviewing the Regional Development Master Plan and Environmental Impact Assessment.
  - Analisis Gambaran pelayanan PD (Analysis of PD Service Description):** Analyzing the description of public service.
  - SPM (Strategic Policy Map):** The Strategic Policy Map, which informs the analysis of public service description.
  - Pengolahan data dan informasi (Data and Information Processing):** Processing data and information to inform the strategic policy map.
  - Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi (Formulation of strategic issues based on duties and functions):** Formulating strategic issues based on the duties and functions of the region.
  - Perumusan tujuan & Sasaran (Formulation of goals and objectives):** Formulating goals and objectives.
  - Perumusan Strategi & Kebijakan (Formulation of Strategy and Policy):** Formulating strategy and policy.
  - Perumusan rencana program, kegiatan, dan kerangka pendanaan (Formulation of program, activity, and funding framework):** Formulating the program, activity, and funding framework.
  - Perumusan indikator kinerja PD (Formulation of PD performance indicators):** Formulating PD performance indicators.
- SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-PD (SE KDH on the Formulation of Renstra-PD Draft):** This stage involves the SE KDH (Regional Development Planning Council) discussing the draft. It includes:
  - Perumusan rencana program, kegiatan, dan kerangka pendanaan (Formulation of program, activity, and funding framework):** Formulating the program, activity, and funding framework.
  - Perumusan indikator kinerja PD (Formulation of PD performance indicators):** Formulating PD performance indicators.
- VERIFIKASI (Verification):** This stage involves the verification of the draft. It includes:
  - Penyesuaian Rancangan Renstra-PD (Adjustment of Renstra-PD Draft):** Adjusting the draft based on the verification results.
  - Rancangan RENSTRA-PD (Renstra-PD Draft):** The final draft of the Renstra-PD.
- Penetapan Renstra PD (Determination of Renstra PD):** This stage involves the final determination of the Renstra PD. It includes:
  - Forum PD (PD Forum):** The PD Forum, which is a key stakeholder in the process.
  - Rancangan RENSTRA-PD (Renstra-PD Draft):** The final draft of the Renstra-PD.
  - VERIFIKASI (Verification):** A final verification step to ensure the draft is accurate.
  - Penetapan Renstra PD (Determination of Renstra PD):** The final determination of the Renstra PD.
  - RENSTRA-PD (Renstra-PD):** The final Renstra-PD document.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2109 ;

12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi Bali ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
16. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

**Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022** merupakan “**Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 5 Tahun**” yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng serta rencana program/ kegiatan dan pagu indikatif, yang dimaksudkan :

1. Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 pada Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Buleleng;
2. Meningkatkan pemahaman seluruh stakeholders terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pemantapan Ketahanan Pangan;
3. Sebagai dasar komitmen bersama di Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng terhadap program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan pangan yang akan dilaksanakan tahun 2017-2022.
4. Meningkatkan kemampuan menganalisa perkembangan ketahanan pangan agar (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah ketahanan pangan, (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal, (iii) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan ketahanan pangan;
5. Meningkatkan koordinasi pembangunan ketahanan pangan yang terpadu untuk diimplementasikan secara terinci dengan jelas untuk membangun sinergi, integrasi dan koordinasi yang baik mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
6. Menumbuhkembangkan jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat di bidang ketahanan pangan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

1. Dalam upaya mensinkronisasikan serta memfokuskan Visi, Misi, Tujuan , Sasaran Program / Kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan.
2. Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergiskan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng
3. Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng melibatkan pejabat terkait diantaranya : Kepala Dinas sebagai Pimpinan Lembaga yang akan merumuskan kebijakan – kebijakan bidang Ketahanan Pangan , Sekretaris sebagai koordinator penyusunan renstra, Kepala Bidang serta Kepala Seksi dan Kasubag sebagai perencana program/kegiatan yang didasarkan atas data/informasi yang relevan.

Penulisan dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Ketahanan Pangan

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.BULELENG**

- 2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BULELENG**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra Badan Ketahanan Pangan RI Kementerian Pertanian RI
- 3.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

**BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KAB. BULELENG**

**BAB VIII. PENUTUP**



**BAB. II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULELENG**

**2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selaku Lembaga Teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng. Adapun **Tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng** adalah “ **membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan** “, sedangkan **Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng** adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan ;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati .

Uraian tugas dari masing-masing Pejabat Struktural lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Ketahanan Pangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas da permasalahannya;
  - f. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian da kebenaran hasil kerja;

- g. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - h. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - i. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - j. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - k. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - l. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - m. melaksanakan koordinasi, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
  - n. membina organisasi, ketatalaksanaan dan Kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
  - o. melaksanakan pengelolaan keuangan, ketatausahaan barang milik pemerintah serta mempertanggung jawabkan keuangan Dinas Ketahanan Pangan;
  - p. mengkoordinasikan, melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
  - q. melaksanakan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
  - r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan keada seluruh unit dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana, keuangan dan Kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- i. mengkoordinasikan, menyusun rencana kerja, rencana anggaran dan membuat laporan kegiatan Dinas dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- j. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- l. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana strategis (RENSTRA), Indikator kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan;
- m. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- n. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketahanan Pangan;
- o. mengkoordinasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Sekretariat selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Sub Bagian sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokola, dokumentasi, kearsipan, dan perpustakaan keada seluruh unit di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
  - h. melaksanakan pembinaan organisasi, tata laksana, dan kepegawaian dilingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan UPT;
  - i. melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi : penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezeting pegawai, menyusun data pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
  - j. menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
  - k. menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan UPT;
  - l. melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
  - m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Ketahanan Pangan;
  - h. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
  - i. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : enerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - j. melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan;
  - k. membuat laporan keuangan Dinas Ketahanan Pangan serta melaporkan keadaan kas kepada atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/ keadaan;
  - l. melaksanakan penatausahaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
  - m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat laporan kegiatan Dinas;
  - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
  - i. menghimpun, menyusun, mengkoordinasikan dan membuat rencana kerja Dinas;
  - j. menghimpun, menyusun, mengkoordinasikan dan membuat rencana anggaran Dinas dan UPT yang meliputi pembuatann RKA dan DPA;
  - k. melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Laporan Akunbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - l. melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  - m. melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Ketahanan Pangan;
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- j. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- k. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - i. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
  - j. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
  - k. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - l. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - m. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - n. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
  - o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
  - p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;



- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - h. melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - j. melakukan penyiapan bahan pendamping kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerawanan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;

- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- k. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis system kewaspadaan pangan dan gizi;
- l. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- m. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Distribusi Pangan, berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- j. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- k. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Distribusi Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;

- j. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - k. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
  - l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang distribusi pangan;
  - m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan;
  - n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Harga Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;;
  - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
  - j. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
  - k. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan
  - l. melakukan penyiapan pengumpuln data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;

- m. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang pasokan dan harga pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Cadangan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- j. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- k. melakukan penyimpanan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang cadangan pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - j. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - k. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. menyusun rencana kegiatan Seksi Konsumsi Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - j. melakukan penyiapan perhitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - k. melakukan penyiapan perhitungan tingkat konsumsi energy dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - l. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - m. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - n. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang konsumsi pangan;
  - o. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- 2) Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas dan fungsi :
- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
  - d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
  - f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
  - g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - i. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya local;
  - j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - k. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - l. melakukan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local;
  - m. melakukan penyiapan bahan pendamping dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - n. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan



p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengembangan Pangan Lokal, berdasarkan data dan program Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan pangan lokal;
- h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengembangan pangan lokal;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- j. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan , evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Keamanan Pangan, berdasarkan data dan program Dinas Ketahanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- j. penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Tugas dan fungsi Bidang Keamaman Pangan selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 Seksi sebagai berikut :

- 1) Seksi Kelembagaan Keamanan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Keamanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Keamanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- k. melakukan penyiapan bahan pendampingan di di bidang pengawasan keamanan pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
- m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

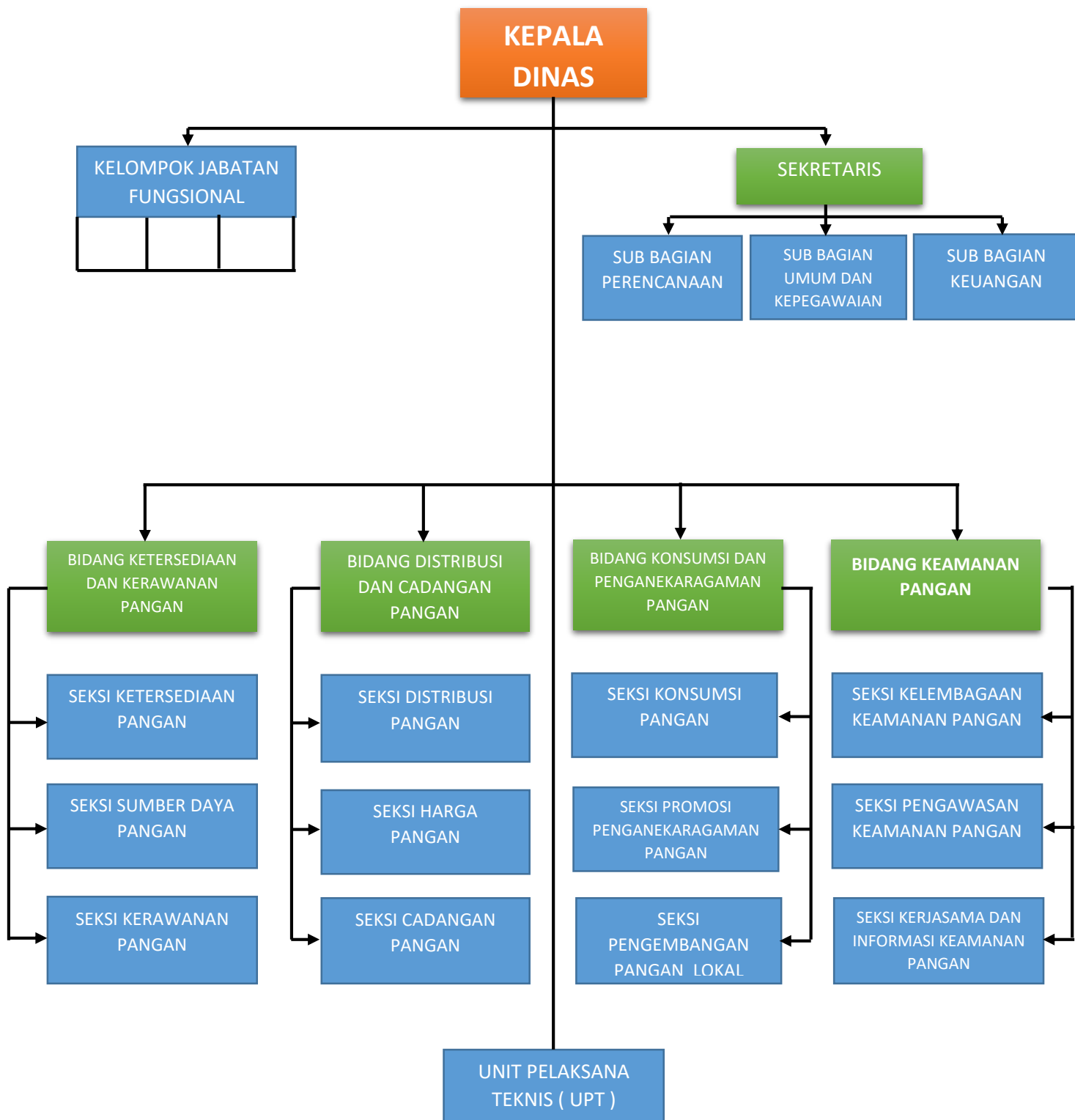
3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan, berdasarkan data dan program Bidang Keamanan Pangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- k. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pendamping di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng . Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng merupakan SKPD Tipe A, terdiri dari Kepala SKPD, Sekretaris dengan tiga kasubag, Empat Kepala Bidang dengan masing-masing tiga Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis. Adapun susunan organisasi selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 2 : Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng



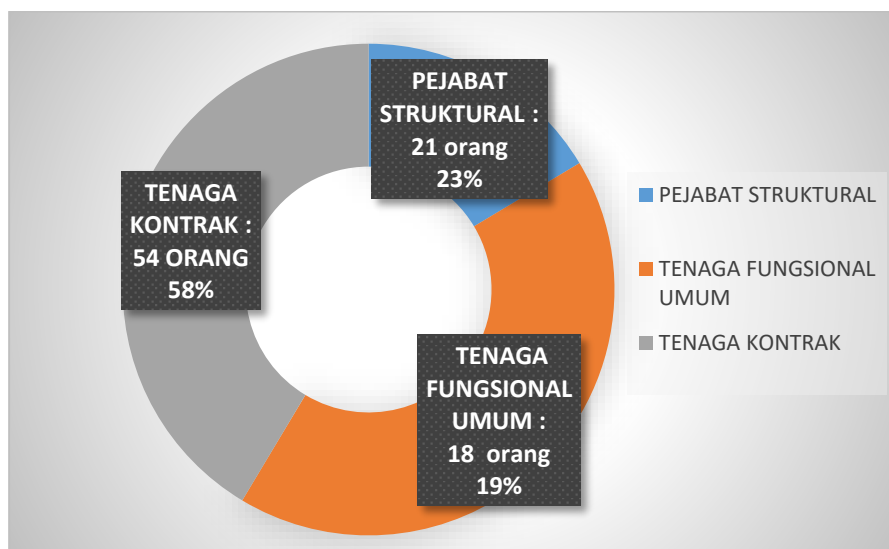
## 2.2 Sumber Daya

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng meliputi Pejabat Struktural , Tenaga Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak. Jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebanyak 93 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dapat di lihat pada gambar berikut ini :

Gambar : 3

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng  
Menurut Status Kepegawaian Berdasarkan Laporan Kepegawaian Keadaan  
Sampai Dengan Bulan Desember 2017



Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan grafik diatas persentase komposisi status kepegawaian yaitu :  
1).Pejabat struktural berjumlah 21 orang atau 23% dari jumlah keseluruhan pegawai yang meliputi Pejabat Eselon II = 1 orang, Pejabat Eselon III = 5 orang, Pejabat Eselon IV = 15 orang. 2) Tenaga Fungsional Umum berjumlah 18 orang atau 19% dari jumlah keseluruhan pegawai yang penempatannya disebar ke masing-masing bidang dan sekretariat. 3). Tenaga Kontrak berjumlah 54 orang atau 58% dari jumlah keseluruhan pegawai yang penempatannya disebar ke masing-masing bidang dan sekretariat. Dilihat dari persentase jumlah pegawai terlihat jelas bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng kekurangan pegawai PNS sehingga perlu adanya usulan tambahan tenaga PNS ke lembaga/instansi terkait.

Komposisi sumberdaya manusia, khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurut pangkat/golongan ruang dan pendidikan adalah seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 2.1

Jumlah Pegawai PNS pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang dan Pendidikan Keadaan Sampai Dengan Bulan Desember 2017

No	Pangkat/Golongan Ruang	Pendidikan					Jumlah	Ket
		S.2	S.1	D.3	SMA/ SMK	SLTP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Golongan I	-	-	-	-	1	1 Orang	
2.	Golongan II	-	1	3	5	-	9 Orang	
3.	Golongan III	-	19	-	5	-	24 Orang	
4.	Golongan IV	3	2	-	-	-	5 Orang	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>3</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>39 Orang</b>	

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1 tingkat pendidikan karyawan/karyawati Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang berstatus PNS paling banyak adalah pendidikan S.1 sebanyak 22 orang (56,41%) dari jumlah keseluruhan pegawai. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng ini merupakan modal dasar yang penting dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng secara umum.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan Kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selain tenaga PNS tenaga kontrak sangat berperan membantu di dalamnya. Jumlah tenaga kontrak hingga saat ini berjumlah 54 orang dengan Komposisi kepegawaian disajikan seperti tabel : 2.2 sebagai berikut :



Tabel : 2.2

Jumlah Pegawai Kontrak pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan Keadaan Sampai Dengan Bulan Desember 2017

No	Status	Pendidikan						Jumlah	Ket
		S.2	S.1	D.3	SMA/ SMK	SLTP	SD		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Tenaga Kontrak	-	17	5	28	2	2	54 Orang	
	<b>JUMLAH :</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>54 Orang</b>	

Sumber : Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan dari tabel 2.2 terlihat bahwa pegawai yang bekerja sebagai tenaga kontrak yang paling banyak dari lulusan dari Sekolah Pendidikan Menengah Atas atau SMA/SMK (51,85%), di ikuti dari lulusan Sarjana (31,48%), lulusan Diploma/D3 (9,26%) dan terakhir lulusan SLTP dan SD (7,41%). Kalau dilihat dari perbandingan jumlah Tenaga Kontrak dengan Jumlah Tenaga Fungsional Umum PNS terlihat bahwa minat masyarakat untuk melamar menjadi tenaga kontrak pada Pemerintah Daerah sangat besar tetapi tidak sebanding dengan penyediaan anggaran yang sangat terbatas. Untuk itu diusulkan upah jasa tenaga kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan daerah dan dibuka lowongan pekerjaan sebagai PNS.

#### 2.2.2 Sarana dan Prasarana

Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang digunakan dalam upaya menunjang kegiatan operasional, tugas dan fungsi keadaan sampai dengan bulan Desember 2017 sesuai dengan buku inventaris barang milik daerah tercatat sebesar Rp. 2.298.234.458,69 ,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.3

Sarana dan Prasarana pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng  
Keadaan Sampai Dengan Bulan Desember 2017

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah ( unit )	Nilai Perolehan ( Rp)
1	2	3	4
1	Kendaraan Dinas Roda 4	3	413.213.000
2	Kendaraan Dinas Roda 2	13	209.177.600
3	Alat-alat Besar	1	3.993.000
4	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	532	1.023.815.171,55
5	Alat-alat studio dan komunikasi	10	34.752.857,14
6	Gedung dan Bangunan	7	244.530.000
7	Jalan Irigasi dan Jaringan	7	368.752.830
<b>Total</b>		<b>573</b>	<b>2.298.234.458,69</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Sarana Prasana Dalam Kondisi Rusak**

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4
1	Mesin Ketik	1	2.400.000
2	Meja Rapat	1	975.000
3	Kursi Rapat	3	750.000
4	Kursi Kerja (Kursi Lipat)	3	960.000
5	Kursi Kerja (K. Putar)	1	1.487.000
6	Meja kerja	1	810.000
7	Korden	125	6.450.000
8	Rak Arsip	1	650.000
9	AC	1	6.240.000
10	Komputer Notebook	1	9.322.000
11	Meja Kerja	1	825.000
12	Televisi	1	15.000.000
13	Camera Digital	1	5.900.000
14	Handy Talky	2	4.642.857,14
15	Meja ½ biro	1	900.000
<b>Total</b>		<b>144</b>	<b>57.311.857,14</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Total Aset yang dikuasai SKPD : Rp2.298.234.458,69

Total Aset yang dipergunakan / kondisi baik : Rp2.240.922.601,55

Total Aset yang tidak dipergunakan : Rp57.311.857,14

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi teknis dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, bermutu, beragam , bergizi , seimbang dan aman baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal untuk mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pencapaian kinerja pelayanan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2016 dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng  
Tahun 2012-2016

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah tingkat ketersediaan pangan utama (beras)	(kg/kapita/ tahun)	-	-	-	-	114
2	Jumlah cadangan pangan kabupaten	Ton / tahun	-	-	-	-	2.018
3	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Nilai	-	-	-	67	85

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buleleng

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis di bidang ketahanan pangan perlu ditingkatkan guna terwujudnya pemantapan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan tahun 2012 - 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dipertahankannya jumlah tingkat ketersediaan pangan utama ( beras ) sebesar 114 kg/kapita/tahun. Dengan pembanding jumlah penduduk sekitar  $\pm$  646.200 jiwa. Dengan demikian dilihat dari ketersediaan pangan utama (beras) penduduk Kabupaten Buleleng telah dapat dipenuhi.
2. Standar angka kecukupan gizi (AKE) yang telah ditetapkan di Indonesia melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari . Dari hasil analisis terhadap indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan, jumlah tingkat ketersediaan energi bagi penduduk sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari telah terpenuhi dengan capaian akhir tahun 2016 terhadap jumlah tingkat ketersediaan energi sebesar 2.498 Kkal/kapita/hari, begitu juga terhadap jumlah tingkat ketersediaan protein bagi penduduk telah dipenuhi dengan capaian akhir tahun 2016 tingkat ketersediaan protein sebesar 68,55 gram/kapita/hari. Dengan demikian dilihat dari tingkat ketersediaan energi dan tingkat ketersediaan protein penduduk Kabupaten Buleleng telah dapat dipenuhi.
3. Jumlah cadangan pangan masyarakat, sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan cadangan pangan pemerintah di tingkat kabupaten sebesar 100 ton ekuivalen beras. Dari hasil analisis kinerja ketahanan pangan, menunjukkan bahwa penyediaan cadangan pangan masyarakat yang diamanatkan sebesar 100 ton telah terpenuhi, dimana cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah capaian sampai akhir tahun 2016 mencapai 2.018 ton/tahun.
4. Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi . Dari hasil analisis kinerja terhadap indikator ini terlihat Skor PPH konsumsi Tahun 2015 sebesar 67 dan Tahun 2016 terealisasi sebesar 85. ini menggambarkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Buleleng masih jauh dibawah SPM yaitu 90, sehingga pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Buleleng masih perlu ditingkatkan agar tercipta pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Skor PPH Konsumsi ideal adalah 100 .

Sampai dengan Tahun 2017, Urusan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan strategis baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta analisis-analisis dalam rangka menghasilkan rumusan-rumusan dan kebijakan peningkatan ketahanan pangan baik dalam bentuk himbauan, edaran, keputusan dalam hal sinkronisasi dan koordinasi

dengan instansi/lembaga/yayasan yang terkait. Pembangunan Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui 4 (empat) Sub Sistem Ketahanan Pangan, yaitu ;

- 1) Sub Sistem Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan
- 2) Sub Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan
- 3) Sub Sistem Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
- 4) Sub Sistem Keamanan Pangan

Sehingga seluruh kegiatan pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mendukung sub sistem tersebut.

#### 1. Sub Sistem Ketersediaan dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

##### 1.1 Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Sub sistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketercukupan Ketersediaan pangan dapat di ukur dari tingkat produksi komoditi pangan, ketersediaan energi dan protein dan capaian nilai/skor PPH ketersediaan.

##### 1.1.1 Produksi Komoditi Pangan

Dilihat dari produksi bahan pangan di Kabupaten Buleleng, Produksi Komoditi Pangan Pokok, Strategis dan Unggul Lokal di Kabupaten Buleleng selama Tahun 2012 – 2016 terjadi peningkatan di beberapa komoditi pangan. Berikut dapat dipaparkan perkembangan produksi perjenis komoditi pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2012 - 2016 seperti tabel berikut :

Tabel : 2.5

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Buleleng  
Tahun 2012 s/d 2016

No	Komoditi	Produksi (ton) Tahun ke-					
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Padi Sawah	134.028	136.286	133.440	128.209	137.243	
2	Jagung	24.941	23.524	18.397	15.850	22.166	
3	Ubi Kayu	12.657	15.974	14.572	7.887	6.211	
4	Ubi Jalar	222	286	115	101	83	
5	Kacang Tanah	2.555	1.536	1.200	1.215	1.403	

No	Komoditi	Produksi (ton) Tahun ke-					
		2012	2013	2014	2015	2016	
6	Kedelai	155	37	29	20	271	
7	Kacang hijau	243	188	213	82	197	

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng

#### 1.1.2 Ketersediaan Energi dan Protein

Ketersediaan energi dan protein penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2017 ( *Data NBM angka tetap 2016* ) telah dapat memenuhi kebutuhan konsumsi bahkan berada diatas angka ketersediaan minimal untuk dikonsumsi masyarakat. Ketersediaan energi untuk dikonsumsi sebesar 3.186 kkal/kapita/hari. Angka ini berada diatas angka ketersediaan energi minimal adalah sebesar 2.200 kkal/kap/hari. Ketersediaan protein untuk dikonsumsi tahun 2017 juga terlihat cukup stabil dengan tingkat ketersediaan protein sebesar 75,82 gram/kap/hari. Angka ini berada diatas angka ketersediaan minimal yaitu 57 gram/kapita /hari. Tingkat ketersediaan energi dan protein untuk dikonsumsi masyarakat Kabupaten Buleleng tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.6

Ketersediaan Energi dan Protein Pada Masing – Masing Komoditi Pangan  
Tahun 2017

No	Komoditi	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)
		2017	2017
1	Padi-padian	1.552	36,94
2	Makanan berpati	64	0,28
3	Gula	6	0,02
4	Buah biji berminyak	207	6,17
5	Buah-buahan	143	1,65
6	Sayur –sayuran	14	0,68
7	Daging	695	24,66
8	Telur	6	0,37
9	Susu	8	0,41
10	Ikan	25	4,62
	Total	3.186	75,82

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab.Buleleng (Data NBM angka tetap 2016)

Tabel : 2.7

## Data Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2017

NO	KETERANGAN	2017
1	Ketersediaan energi penduduk	3.186 kkal/kap/hr
2	Ketersediaan protein penduduk	75,82 gram/kap/hr

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng (Data NBM Angka Tetap 2016)

## 1.1.3 Skor Pola Pangan Harapan ( PPH ) Ketersediaan

Pola pangan harapan berguna sebagai instrumen dalam menilai ketersediaan pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat dan digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman pangan . Semakin tinggi skor mutu pangan , menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisinya dan mutu gizinya. Berikut disampaikan Skor PPH Ketersediaan Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel : 2.8

## Skor PPH Ketersediaan Pada Masing-Masing Kelompok Bahan Pangan

Tahun 2017

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (kalori)	%AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks.
1	Padi-padian	1.552	70,5	0,5	35,3	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	64	2,9	0,5	1,5	1,5	2,5
3	Pangan hewani	442	20,1	2,0	40,2	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	1.512	68,1	0,5	34,4	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	61	2,8	0,5	1,4	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	163	7,4	2,0	14,8	10,0	10,1
7	Gula	3	0,1	0,5	0,1	0,1	2,5
8	Sayuran dan buah	35	1,6	5,0	8,0	8,0	30,5
9	Lain-lain						
	Jumlah	3.832	174,2		135,5	74,48	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng (Data NBM Angka Tetap 2016)

## 1.2 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Ketahanan pangan telah menjadi salah satu variabel strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan masih perlu mendapat perhatian. Pengelolaan program ketahanan pangan dan gizi yang efektif memerlukan informasi ketahanan pangan dan gizi yang akurat dan tertata dengan baik, karena melalui informasi itulah berbagai intervensi kebijakan bisa dilakukan untuk penanganan masalah pangan. Kegiatan penanganan daerah rawan

pangan di Tahun 2017 yang dilaksanakan berupa pendampingan atau pengawalan terhadap penerima manfaat Beras Rastra yang tersebar di 9 kecamatan. Adapun tanda-tanda rawan pangan yaitu 1) kekurangan produksi dan cadangan pangan di suatu tempat, 2) kurang gizi dan adanya gangguan kesehatan 3) masalah sosial ekonomi dalam usaha individu atau rumah tangga. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di 9 Kecamatan belum ditemukan daerah rawan pangan.

## 2. Sub Sistem Distribusi dan Cadangan Pangan

### 2.1 Distribusi

Kondisi ketersediaan pangan sangat berkaitan dengan distribusi, harga dan pasokan pangan dan merupakan faktor strategis. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Terjadinya gangguan pada pasokan yang dapat mempengaruhi harga pangan perlu segera ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan keresahan dan gejolak sosial pada masyarakat.

Pengembangan Jaringan informasi harga pangan sangat diperlukan, sehingga informasi harga pangan cepat dan akurat dapat diakses/diterima oleh yang membutuhkan. Hal ini dimaksud agar dapat mengetahui kondisi harga diberbagai tempat. Situasi harga yang berbeda disetiap tempat akan memungkinkan yang berkepentingan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Pengambilan data harga pasar yang dilakukan saat ini adalah pada saat terjadinya aktifitas pasar atau terjadinya transaksi, yang dihimpun setiap minggu oleh petugas neumerator Kabupaten. Adapun perkembangan harga rata-rata komoditi pangan tingkat pedagang eceran dan pedagang grosiran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.9  
Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditi Pangan Per-Kg  
Tingkat Pedagang Eceran Tahun 2017

N o	Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Beras premium	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Beras medium	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
3	Beras	9.000	9.000	9.000	9.000	-	-	-	-	-	-	-	-



N o	Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
	termurah												
4	Jagung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Kedelai	11.000	11.000	11.000	11.000	10.700	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6	Gula pasir lokal	14.000	13.875	14.000	14.000	13.500	13.000	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Bawang merah	33.750	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000	32.500	25.000	18.000	18.000	22.000	22.500
8	Cabai merah	147.500	140.000	103.750	63.750	55.000	25.875	32.500	25.000	15.000	15.000	19.000	34.500
9	Daging ayam ras	34.500	34.500	33.000	33.000	34.500	36.675	37.000	40.000	35.000	35.000	36.000	36.000
10	Telur ayam ras	17.000	17.000	16.000	16.000	18.375	19.000	19.000	19.000	19.000	18.000	18.000	18.000
11	Daging sapi murni	95.000	95.000	95.000	95.000	93.750	100.000	100.000	90.000	92.500	92.500	95.000	92.500
12	Minyak goreng curah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Tepung terigu	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel : 2.10

Perkembangan Harga Rata-Rata Komoditi Pangan Per- Kg  
Tingkat Pedagang Grosiran Tahun 2017

No	Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Beras premium	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
2	Beras medium	9.000	9.000	9.000	9.000	9.100	9.000	9.000	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
3	Beras termurah	8.500	8.500	8.500	8.500	8.800	-	-	-	-	-	-	-
4	Jagung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Kedelai	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Bawang merah	26.250	26.250	26.250	26.250	25.000	25.000	25.000	20.750	10.875	14.500	18.000	18.000
7	Cabe merah keriting	90.000	90.000	90.000	56.250	45.000	25.000	30.000	20.750	10.750	11.375	17.000	17.000

No	Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
8	Gula pasir lokal	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	Daging ayam ras	28.000	28.000	28.000	28.000	30.000	34.500	34.500	37.250	33.875	32.500	35.000	35.000
10	Telur ayam ras	14.125	14.125	14.125	14.125	15.500	17.000	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel : 2.11

### Harga Pangan Strategis Tahun 2017

No	Komoditi	Harga Rata-rata Tertinggi (Rp/kg)
1	Beras Medium	10.500
2	Jagung	6.000
3	Kedelai	10.500
4	Cabe merah	103.750
5	Bawang merah	35.000
6	Minyak Goreng	15.000
7	Gula Pasir	14.000
8	Daging Sapi	100.000
9	Daging Ayam	40.000
10	Telur	22.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Dari tabel diatas, harga komoditi pangan **cabe merah** dan **daging sapi** patut menjadi perhatian dalam upaya menjaga gejolak harga pangan di pasaran / ditingkat konsumen mengingat begitu besar permintaan terhadap komoditi pangan tersebut.

## 2.2 Cadangan Pangan

Peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan telah dilakukan kegiatan yaitu pengembangan lumbung pangan baik dari APBD maupun APBN. Lumbung Pangan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan dengan sistem tunda jual, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan yang dikelola secara berkelompok. Strategi pengembangan lumbung pangan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana

lumbung yang telah disediakan oleh pemerintah, mengembangkan berbagai cara untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk pengelolaan lumbung yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat setempat serta mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara terbuka dan transparan. Di Kabupaten Buleleng terdapat 16 kelompok Lumbung Pangan Masyarakat, yang aktif 12 kelompok dan sudah mendapatkan dana DEKON masing-masing sebesar Rp 20.000.000,-. 9 kelompok lumbung pangan masyarakat yang katagori sehat dan 4 kelompok Lumbung Pangan masyarakat baru mendapatkan bangunan fisik berupa Gudang dan lantai jemur saja, dan belum mendapatkan bangunan mesin dan modal kerja, sehingga belum dapat beroperasi maksimal. Untuk mengetahui kondisi cadangan pangan daerah berikut disajikan data Lumbung Pangan Masyarakat, Data Cadangan Pangan Pemerintah dan Data Penggilingan Padi sebagai berikut :

a) Lumbung Pangan Masyarakat ( LPM )

Tabel : 2.12

Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Di Kabupaten Buleleng

Tahun 2012 - 2017

No	Kecamatan	Jumlah Lumbung Pangan Tahun ke-						Jumlah Total s/d Tahun 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Buleleng	-	-	1	-	-	-	1
2	Busungbiu	-	-	-	-	-	-	-
3	Seririt	1	-	1	1	-	-	3
4	Gerokgak	-	-	1	-	1	-	2
5	Banjar	1	-	-	-	-	-	1
6	Sukasada	1	-	-	1	-	-	2
7	Sawan	-	-	-	-	1	-	1
8	Kubutambahan	1	-	-	-	1	-	2
9	Tejakula	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		4	-	3	2	3	-	12

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel : 2.13  
Cadangan / Lumbung Pangan Masyarakat (CPM)

NO	KETERANGAN	2017
1	Rata2 Kapasitas	2 Ton/Tahun
2	Jumlah Lumbung	9 Unit
3	Komoditas	Beras

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 12 LPM yang ada hanya 9 LPM yang aktif atau 75 % yang beroperasi dengan penyediaan cadangan pangan (beras) diperkirakan sekitar 2 ton/tahun permasing-masing LPM, sehingga kalau di total dari jumlah 9 LPM dengan masing-masing LPM penyediaan cadangan pangan (beras) 2 ton/tahun maka secara keseluruhan cadangan pangan (beras) di tingkat Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) di perkirakan mencapai 18 ton/tahun. Berikut disajikan nama kelompok Lumbung Pangan Masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel : 2.14  
Nama Kelompok Lumbung Pangan di Kabupaten Buleleng

NO	NAMA LUMBUNG PANGAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
1	SUBAK LANYAHAN	DESA PAKISAN	KUBUTAMBAHAN	TIDAK AKTIF
2	SUBAK BILA	DESA BILA	KUBUTAMBAHAN	AKTIF
3	GAPOKTAN MERTA SARI	DESA BEBETIN	SAWAN	TIDAK AKTIF
4	SUBAK DANGIN YEH	DESA GIRIMAS	SAWAN	AKTIF
5	GAPOKTAN CATUR TANI SUSILA	DESA TUKAD MUNGGA	BULELENG	AKTIF
6	KELOMPOK SARI GOPALA	KELURAHAN BANYUNING	BULELENG	TIDAK AKTIF
7	SUBAK BABAKAN KATIASA	DESA PEGADUNGAN	SUKASADA	AKTIF
8	GAPOKTAN PALA SARI MUKTI	DESA KALIASEM	BANJAR	AKTIF
9	SUBAK GEDE PANGKUNG PARUK	DESA SERIRIT	SERIRIT	AKTIF
10	SUBAK MAYONG PENGULKULAN	DESA RINGDIKIT	SERIRIT	AKTIF
11	SUBAK TUKAD SUMAGA	DESA TUKAD SUMAGA	GEROKGAK	AKTIF
12	SUBAK GEROKGAK	DESA GEROKGAK	GEROKGAK	AKTIF

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

b) Cadangan Pangan Pemerintah ( CPP )

Tabel : 2.15

Cadangan Pangan Pemerintah ( CPP ) Tahun 2017

NO	KETERANGAN	2017
1	Luas Bangunan Gudang	42 x 22 M2
2	Status Kepemilikan Gudang	Pemerintah Pusat
3	Komoditas	Beras
4	Stok	900 Ton

Sumber : BULOG ( Badan Usaha Logistik ) Kab. Buleleng

Tabel diatas merupakan data cadangan pangan milik pemerintah yaitu Bulog ( Badan Usaha Logistik ) yang berlokasi di Kecamatan Banjar. Seperti di ketahui Bulog adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang tugasnya mengurus Logistik dan Pangan ( beras ). Bulog memiliki kewajiban untuk menjaga harga dasar pembelian gabah, harga bahan pangan pokok tetap stabil, mengelola stok pangan dan menyalurkan beras untuk warga miskin yang kita kenal sekarang dengan istilah RASTRA ( Beras Sejahtra ).

c) Penggilingan Padi

Cadangan pangan (beras) erat kaitannya dengan penggilingan padi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 penggilingan padi merupakan satu perangkat lengkap yang digerakkan dengan tenaga mesin untuk menggiling padi atau gabah menjadi beras sosoh. Penggilingan Padi sangat mendukung kondisi Ketahanan Pangan suatu daerah . Berikut di sajikan data penggilingan padi yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel : 2.16

Data Penggilingan Padi Tahun 2017

No	Kecamatan	Desa	Kapasitas Penggilingan (kg/jam)	Kepemilikan	Luas Lantai Jemur (m2)
1	BULELENG :				
	- Gapoktan catur tani susila	Desa Tukad mungga	400 kg/jam	Gapoktan	200
	- Subak kayu pas beduuran	Desa Banyuning	1000 kg/jam	Pribadi + Gapoktan	2200
	- UD. Sari Asih	Desa Penglatan	1000 kg/jam	Pribadi + Gapoktan	2500
	- UD. Merta Nadi	Desa Alasangker	1300 kg/jam	Pribadi	1500
	- UD Widya Sari	Desa	400 kg/jam	Pribadi	500

No	Kecamatan	Desa	Kapasitas Penggilingan (kg/jam)	Kepemilikan	Luas Lantai Jemur (m2)
		Jinengdalem			
2	SUKASADA				
	- Subak Kedu	Desa Panji Anom	400 kg/jam	Subak	200
	- Subak Babakan katiasa	Desa Pegadungan	400 kg/jam	Subak	300
	- UD. Sari Nadi	Desa Sukasada	1200 kg/jam	Pribadi + Gapoktan	2000
3	BANJAR				
	- UD. Sri Muncul	Desa Kayu Putih	700 kg/jam	Pribadi	800
4	SERIRIT				
	- Subak gede pangkung paruk	Desa Pangkung Paruk	500 kg/jam	Subak	300
	- Subak mayong pengulkulan	Desa Ringdikit	400 kg/jam	Subak	100
	- Subak joanyar	Desa Joanyar	750 kg/jam	Subak	400
	- Gapoktan wira rahayu	Desa Kalianget	1000 kg/jam	Pribadi + Gapoktan	1000
	- UD. Artha Dyana	Desa Bubunan	1000 kg/jam	Pribadi	1200
	- UD. Dewi Sri	Desa Ringdikit	500 kg/jam	Pribadi	1000
5	GEROKGAK				
	- Subak tukad sumaga	Desa Tukad Sumaga	400 kg/jam	Subak	700
	- Subak gede gerokgak	Desa Gerokgak	750 kg/jam	Subak	100
	- UD. Rama	Desa Sanggalangit	400 kg/jam	Pribadi	700
6	BUSUNGBIU				
	- PB. Amertha Kasih	Desa Bengkel	1000 kg/jam	Pribadi + Gapoktan	1000
7	SAWAN				
	- Gapoktan Merta Sari	Desa Bebetin	400 kg/jam	Gapoktan	100
	- PB. Sri Rahayu	Desa Sinabun	700 kg/jam	Pribadi	800
	- PB. Suwela	Desa Jagaraga	1000 kg/jam	Pribadi	1200
8	KUBUTAMBAHAN				
	- Subak Bila	Desa Bila	400 kg/jam	Subak	200
	- Subak Lanyahan	Desa Pakisan	400 kg/jam	Subak	100
	- PB. Urip	Desa Bengkala	1200 kg/jam	Pribadi	1500

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Selain pengembangan lumbung pangan dalam rangka penguatan cadangan pangan kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa : Penguatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Penguatan Toko Tani Indonesia. Kegiatan Penguatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan TTI ini adalah bagian kegiatan program peningkatan ketahanan pangan yang bertujuan meningkatkan kemampuan Gapoktan dan unit-unit usaha yang dikelolanya (distribusi/pemasaran dan cadangan pangan) dalam usaha memupuk cadangan pangan dan memupuk modal dari usahanya dan dari anggotanya yang tergabung dalam wadah Gapoktan serta mendukung kapasitas Gapoktan dalam mengelola distribusi hasil produksinya agar anggotanya dapat memperoleh harga yang optimal pada saat musim panen. Berikut disajikan data PUPM dan TTI Tahun 2012 – 2017 seperti tabel di bawah ini :

Tabel : 2.17

Jumlah PUPM Di Kabupaten Buleleng Tahun 2012 – 2017

No	Kecamatan	Jumlah PUPM Tahun ke-						Jumlah Total s.d Tahun 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Buleleng	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit
2	Busungbiu	-	-	-	-	1 unit	-	1 unit
3	Seririt	-	-	-	-	-	-	-
4	Gerokgak	-	-	-	-	-	-	-
5	Banjar	-	-	-	-	-	-	-
6	Sukasada	-	-	-	-	-	-	-
7	Sawan	-	-	-	-	-	-	-
8	Kubutambahan	-	-	-	-	-	-	-
9	Tejakula	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		-	-	-	-	2 unit	-	2 unit

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Berikut disajikan nama kelompok PUPM yang di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.18

Nama Kelompok/Gapoktan PUPM Yang Ada di Kabupaten Buleleng

NO	NAMA GAPOKTAN	LOKASI	KECAMATAN	KET
1	GAPOKTAN KENCANA MAS	DESA PENGLATAN	BULELENG	AKTIF
2	GAPOKTAN WIDYA SARI	DESA BENGKEL	BUSUNGBIU	AKTIF

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel : 2.19

Jumlah Toko Tani Indonesia ( TTI ) Di Kabupaten Buleleng

Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah TTI
1	Buleleng	2 unit
2	Busungbiu	2 unit
3	Seririt	2 unit
4	Gerokgak	1 unit
5	Banjar	-
6	Sukasada	-
7	Sawan	1 unit
8	Kubutambahan	1 unit
9	Tejakula	1 unit
Jumlah Total		10 unit

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Berikut disajikan nama kelompok TTI yang di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.20

Nama Kelompok TTI ( Toko Tani Indonesia ) Yang Ada di Kabupaten Buleleng

NO	NAMA KELOMPOK	LOKASI	KECAMATAN
1	Kelompok Suka Duka Karya Lestari	Desa Penglatan	Buleleng
2	PD. Pasar Buleleng	Desa Banyuasri	Buleleng
NO	NAMA KELOMPOK	LOKASI	KECAMATAN
3	Bumdes Les	Desa Les	Tejakula



4	Bumdes Bulian	Desa Bulian	Sawan
5	Bumdes Sangsit	Desa Sangsit	Kubutambahan
6	Bumdes Ringdikit	Desa Ringdikit	Seririt
7	Bumdes Sepang	Desa Sepang	Busungbiu
8	Bumdes Munduk Bestale	Desa Bestale	Seririt
9	Bumdes Sanggalangit	Desa Sanggalangit	Gerokgak
10	KWT Wisma Karya	Desa Bengkel	Busungbiu

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

### 3. Sub Sistem Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

#### 3.1 Konsumsi energi dan Protein

Konsumsi bahan pangan Berdasarkan Permenkes Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia, rata-rata kecukupan energi dan protein pada tingkat konsumsi masing-masing sebesar 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gram/kapita/hari. Angka ini mengalami peningkatan dari sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 2.000 / kkal / kapita / hari dan 52 gram / kapita / hari (Kepmenkes 1593) / Menkes / SK / XI / 2005 ) dengan skor pola pangan harapan (PPH) adalah 100. Skor PPH konsumsi tahun 2017 sebesar 88 dengan konsumsi energi sebesar 2.096 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein sebesar 51 gram/kapita/hari. Pola konsumsi dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Konsumsi bahan pangan ideal perjenis komoditi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.21

#### Konsumsi Pangan Ideal dan Skor PPH

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Pangan (kkal/kap/hari)	Skor PPH
1	Padi-padian	1000	25,00
2	Umbi-umbian	120	2,50
3	Pangan hewani	240	24,00
4	Minyak dan Lemak	200	5,00

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Pangan (kkal/kap/hari)	Skor PPH
5	Buah/Biji berminyak	60	1,00
6	Kacang-kacangan	100	10,00
7	Gula	100	2,50
8	Sayur dan buah	120	30,00
9	Lain-Lain	60	-
	Total	2.000	100

Konsumsi energi dan protein masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 beserta Skor PPH nya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.22

Konsumsi Energi dan Protein Penduduk Kabupaten Buleleng  
Tahun 2017 Terhadap Kelompok Bahan Pangan

No	Kelompok Pangan	Konsumsi energi ( kkal/kapita/hari )	Konsumsi protein ( gram/kapita/hari )
		2017	2017
<b>I</b>	<b>Padi-padian</b>	<b>1.086,5</b>	<b>21,5</b>
1	Beras	1.120,4	20,5
2	Jagung	21,0	0,6
3	Terigu	124,9	0,4
<b>II</b>	<b>Umbi-umbian</b>	<b>37,1</b>	<b>0,2</b>
1	Singkong	17,8	0,1
2	Ubi jalar	9,8	0,0
3	Kentang	0,5	0,0
4	Sagu	3,2	0,1
5	Umbi lainnya	5,9	-
<b>III</b>	<b>Pangan Hewani</b>	<b>221,9</b>	<b>16,4</b>
1	Daging Ruminansia	39,0	1,4
2	Daging unggas	77,0	4,5
3	Telur	28,9	2,2
4	Susu	34,3	1,5
5	Ikan	42,7	6,7
<b>IV</b>	<b>Minyak dan Lemak</b>	<b>249,2</b>	<b>0,0</b>
1	Minyak kelapa	7,4	0,0
2	Minyak sawit	0,0	0,0
3	Minyak lainnya	241,7	0,0

No	Kelompok Pangan	Konsumsi energi ( kkal/kapita/hari )	Konsumsi protein ( gram/kapita/hari )
V	Buah/Biji berminyak	26,5	0,3
1	Kelapa	19,4	0,2
2	Kemiri	7,0	0,1
<b>VI</b>	<b>Kacang-kacangan</b>	<b>79,3</b>	<b>7,4</b>
1	Kedelai	72,0	7,1
2	Kacang Tanah	7,2	0,4
3	Kacang hijau	0,0	0,0
4	Kacang lainnya	0,0	0,0
<b>VII</b>	<b>Gula</b>	<b>69,2</b>	<b>0,0</b>
1	Gula pasir	66,0	0,0
2	Gula merah	3,1	0,0
<b>VIII</b>	<b>Sayur dan buah</b>	<b>115,2</b>	<b>3,9</b>
1	Sayur	50,4	3,3
2	Buah	64,8	0,6
<b>IX</b>	<b>Lain-Lain</b>	<b>26,5</b>	<b>1,3</b>
1	Minuman	26,5	1,0
2	Bumbu-bumbuan	5,0	0,3
	<b>Total</b>	<b>2.096,2</b>	<b>51</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel : 2.23

Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Serta Skor PPH Tahun 2016 - 2017

Uraian	Tahun ke-	
	2016	2017
Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)	2.085	2.096
Konsumsi Protein (gram/kap/hari)	59,5	51
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	88

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Tabel : 2.24

Skor PPH Konsumsi Tahun 2017

NO	KELOMPOK PANGAN	ENERGI AKTUAL	% AKTUAL	% AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	Padi-padian	1678	4,94	55,94	0,5	5,6	27,98	25	25
2	Umbi-umbian	52	0	2,45	0,5	1,23	1,23	2,5	2,5

NO	KELOMPOK PANGAN	ENERGI AKTUAL	% AKTUAL	% AKE	BOBOT	SKOR AKTUAL	SKOR AKE	SKOR MAKS	SKOR PPH
3	Pangan Hewani	212	1,37	9,98	2	19,96	19,79	24	24
4	Minyak dan Lemak	67	0,43	3,12	0,5	1,56	1,84	5	1,84
5	Buah /Biji Berminyak	0	0	0	0,5	0	0,2	1	0,2
6	Kacang-Kacangan	33	0,21	1,5	2	3	3,06	10	10
7	Gula	39	0,27	1,8	0,5	0,91	0,91	2,5	0,91
8	Sayur dan Buah	10	0,07	0,4	5	2,42	23,8	30	23,8
9	Lain-lain	61	0,38	2,28	0	0		0	0
		<b>2152</b>	<b>7,67</b>	<b>77,47</b>	<b>-</b>	<b>34,68</b>	<b>78,81</b>	<b>100</b>	<b>88,25</b>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan pola konsumsi masyarakat yang beragam , bergizi, seimbang dan aman ( B2SA ) . Tahun 2017 Skor PPH Konsumsi tercapai 88 artinya rata-rata dari hasil perhitungan skor PPH di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa masih terbatasnya konsumsi pada jenis bahan pangan yang bersumber dari umbi-umbian ,sayur dan buah serta beberapa rumah tangga masih adanya keterbatasan mengkonsumsi pangan hewani. Kedepan diperlukan adanya gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan nabati maupun hewani berbasis sumber daya lokal.

Tabel : 2.25

Data Konsumsi Tahun 2017

NO	KETERANGAN	2017
1	Konsumsi protein penduduk	51 gram/kap/hr
2	Konsumsi energi penduduk	2.096 kkal/kap/hr
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88
4	Konsumsi beras	108 kg/kap/th
5	Konsumsi pangan hewani	34 kg/kap/th
6	Konsumsi buah dan sayuran	69 kg/kap/th
7	Konsumsi pangan non beras (Sumber Karbohidrat)	29 kg/kap/th

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan, diupayakan pula tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA) yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Kabupaten Buleleng mengalami

kenaikan yaitu tahun 2016 sebesar 85 , tahun 2017 sebesar 88. Laju peningkatan skor PPH mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam, bergizi dan seimbang. Nilai/skor PPH Konsumsi ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH Konsumsi maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik.

### 3.2. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

Kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), merupakan gerakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH sebesar 100. Gerakan P2KP ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat, aktif dan produktif. Gerakan P2KP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peningkatan diversifikasi pangan dan merupakan salah satu kunci sukses pembangunan pertanian di Indonesia. P2KP dilaksanakan dalam bentuk kegiatan utama yaitu: (a) Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari; (b) Pengembangan Pangan Lokal . Di Kabupaten Buleleng tahun 2017 percepatan P2KP hanya baru bisa melaksanakan kegiatan point (a) yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari.

Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari tahun 2017 dimana kegiatan utamanya Pemberdayaan Kelompok Wanita dilaksanakan di 5 KWT (kelompok wanita tani ) melaui dana APBN dan ditambah dana dari APBD sebagai dana pendamping. Alokasi anggaran APBN Tahun 2017 sebesar Rp.75.000.000,- dengan rincian kegiatan KRPL yaitu : 1) pengembangan pekarangan, 2) pengembangan demplot, dan 3) pembuatan kebun bibit serta pembelian bibit. Lokasi KRPL Dinas Ketahanan Kabupaten Buleleng tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.26

Lokasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Di  
Kabupaten Buleleng Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah KRPL	Nama Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

No	Kecamatan	Jumlah KRPL	Nama Kelompok	Jumlah Anggota Kelompok
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Buleleng	2	- Kelompok wanita tani sekat Sandat - Kelompok wanita tani pawitrena satya laksmi	25 34
2	Busungbiu	-	-	-
3	Seririt	-	-	-
4	Gerokgak	1	- Kelompok wanita tani permata indah	20
5	Banjar	-	-	-
6	Sukasada	-	-	-
7	Sawan	1	- Kelompok wanita tani citra tani mandiri	25
8	Kubutambahan	1	- Kelompok wanita tani dewi lestari	30
9	Tejakula	-	-	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Jenis tanaman pangan yang di tanam serta hasilnya dapat digambarkan seperti tabel dibawah ini :

Tabel : 2.27

Jenis Tanaman Pangan RPL dan Hasil Produksinya

No	Desa	Kecamatan	Jenis Tanaman	Produksi
1	Desa Bebetin	Sawan	cabe rawit	0,35 kg/pohon
			cabe besar	0,75 kg/pohon
			terong	1,1 kg/pohon
			tomat	1,1 kg/pohon
			timun	3 kg/pohon
			pepaya california	5 kg/pohon
2	Desa Sumberkime	Gerokgak	Bayam	0,45 kg/pohon
			lombok besar	0,80 kg/pohon
			lombok kecil	0,25 kg/pohon
			seledri	0,3 kg/m <sup>2</sup>
			kangkung darat	1,5 kg/m <sup>2</sup>
			sayur hijau	2 kg/m <sup>2</sup>
			tomat	1,2 kg/pohon

No	Desa	Kecamatan	Jenis Tanaman	Produksi
			terong	1,5 kg/pohon
3	Desa Pakisan	Kubutambahan	cabe	0,36 kg/pohon
			terong	1,4 kg/pohon
			sawi	1,5 kg/m <sup>2</sup>
			selada kriting	1,6 kg/m <sup>2</sup>
			tomat	1,3 kg/pohon
4	Desa Penglatan	Buleleng	terong	1,7 kg/pohon
			tomat chery	1,1 kg/pohon
			seledri	0.2 kg/m <sup>2</sup>
			pepaya california	6 kg/pohon
			cabe	1,1 kg/pohon
5	Desa Pamaron	Buleleng	jambu jamaika	blm menghasilkan
			jambu kristal	blm menghasilkan
			blimbing	blm menghasilkan
			cabe rawit	1,2 kg/pohon
			Terong	2,1 kg/pohon
			kangkung darat	1,5 kg/m <sup>2</sup>

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

RPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Prinsip dasar KRPL adalah: (i) pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya genetik pangan (tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya melalui kebun bibit desa (v) peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk membentuk pola konsumsi pangan yang baik. Disamping itu perlu dijalin kerja sama kemitraan dengan pihak swasta yang antara lain bisa berupa Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) baik di bidang pangan maupun bidang lainnya lainnya seperti pendidikan dengan sosialisasi baik kepada anak usia dini maupun kepada kelompok wanita dan masyarakat dalam konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

#### 4. Sub Sistem Keamanan Pangan

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat. Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, produsen pangan dan masyarakat.

Dalam rangka pengawasan keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng melalui Bidang Keamanan Pangan telah melakukan uji sampel pangan segar sebanyak 20 sampel pangan segar yang diperoleh dari 8 pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng . Uji keamanan pangan dengan menggunakan Rapid Tes Kit terhadap residu pestisida, logam berat dan mikroba pada produk pangan segar. Berdasarkan hasil pengujian sampel pangan segar, persentase pangan aman atau yang Memenuhi Syarat (MS) mencapai 75% atau 15 sampel pangan aman . Berikut disampaikan hasil uji dengan menggunakan Rapid Tes Kit sebagai berikut :

Tabel : 2.28

Persentase Pangan Aman Berdasarkan Uji Rapid Tes Kit Keamanan Pangan

Tahun	Jumlah Pangan Aman ( Memenuhi Syarat, MS )	Jumlah Sample Yang Diuji	Persentase Pangan Aman (%)
2017	15 sample	20 sample	75 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapatnya pangan segar yang mengandung pestisida sebanyak 5 sample ( hasil uji rapid tes kit ), selanjutnya dari 5 sample pangan yang tidak aman diuji kembali ke laboratorium untuk mengetahui lebih rinci kandungan pestisida . Hasilnya semua aman, terbukti dari hasil uji laboratorium yang menyatakan bahwa ke 5 sample Non Detection. Kelima sample pangan tersebut adalah sayur kacang lilit, sayur daun bayam, bayam cabut, buah apel manalagi dan tomat.

Kondisi keamanan pangan dikatakan baik jika terjadi penurunan kasus-kasus penyakit asal pangan seperti diare, sakit perut, mual, muntah dan keracunan. Kondisi keamanan pangan yang akan menghasilkan manusia yang sehat dan produktif. Berikut disampaikan kejadian penyakit yang disebabkan oleh pangan



sesuai dengan data kasus-kasus penyakit diare dan keracunan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

Tabel : 2.29

Jumlah Kasus Penyakit Yang Disebabkan Oleh Pangan

No	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Diare	9.661	10.007	8.889	10.774	10.461
2.	Keracunan	11	8	1	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buleleng

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kejadian penyakit yang disebabkan oleh pangan dapat dikatakan masih rendah berkisar dari 1,1 % s/d 1,7 % dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng sebanyak 646.200 jiwa. Dengan demikian kondisi keamanan pangan Kabupaten Buleleng masih di katakan aman.

## 2.4 Tantangan Dan Peluang

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Buleleng 5 tahun mendatang adalah :

- Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- Masih terdapatnya keluarga miskin yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
- Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
- Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.
- Alih fungsi lahan, pertambahan jumlah penduduk, anomali iklim adalah beberapa hal yang dapat mengancam bagi produksi dan ketersediaan pangan;
- Dalam hal distribusi, pasokan, harga dan akses pangan, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten pensuplai bahan pangan , sehingga menjadi ancaman bagi stabilisasi harga dan ketersediaan, serta alur tata niaga;
- Dalam hal keamanan pangan masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan;

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng 5 tahun mendatang adalah :

- a. Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.
- b. Kabupaten Buleleng merupakan wilayah surplus pangan, sehingga dapat mensuplay bahan pangan bagi kabupaten tetangga.
- c. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
- d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan
- e. Ketersediaan sumber pangan lokal yang belum dikelola secara optimal.
- f. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat memberikan peluang pada percepatan perubahan pola pikir dan perilaku konsumsi masyarakat. Hal ini merupakan momentum bagi pengembangan diversifikasi pangan;
- g. Pengembangan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/perbankan dan masyarakat, merupakan peluang bagi pemantapan ketahanan pangan.

**BAB. III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BULELENG**

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Buleleng. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Isu strategis yang kini sedang dihadapi dunia adalah perubahan iklim global, terjadi krisis pangan dan energi dunia, harga pangan dan energi meningkat, sehingga negara-negara yang semula menjadi pengekspor pangan cenderung menahan produknya dijadikan stok pangan. Kondisi global tersebut juga terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan upaya-upaya guna mengamankan produksi dan meningkatkan stok pangan nasional. Isu strategis nasional lainnya adalah mengenai laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, tingginya laju konversi lahan, terbatasnya infrastruktur pertanian serta pola pangan penduduk yang bergantung pada beras.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah kemandirian pangan masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan, keamanan pangan. Permasalahan dan tantangan dalam pembangunan ketahanan pangan secara umum menyangkut pertumbuhan penduduk, semakin terbatasnya sumber daya alam dan beralih fungsinya lahan pertanian, masih terbatasnya prasarana dan sarana usaha di bidang pangan, semakin ketatnya persaingan pasar dengan produk impor, serta besarnya proporsi penduduk miskin. Permintaan bahan pangan per kapita juga meningkat didorong oleh meningkatnya pendapatan, kesadaran kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi dan ragam aktivitas masyarakat.

Melihat kondisi saat ini , Identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Strategis 2017 - 2022 berdasarkan tupoksi sebagai berikut :

1. Dari aspek ketersediaan pangan , masih tingginya ketergantungan konsumsi pangan masyarakat terhadap pangan beras yaitu sekitar 131 kg/kapita/tahun ( data NBM Angka Tetap Tahun 2016 ) dan semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian



produktif ke sektor non pertanian yang menyebabkan menyempitnya lahan pertanian tanaman pangan.

2. Masih terdapatnya penduduk miskin yang rentan rawan pangan . Berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin di kabupaten buleleng sampai dengan tahun 2016 mencapai 37,55 ribu jiwa.
3. Cadangan pangan masyarakat perlu di tingkatkan untuk mengantisipasi musim-musim paceklik atau kondisi darurat akibat adanya bencana alam. Tahun 2017 cadangan pangan masyarakat sebesar 18 ton / tahun, angka ini didapat dari data lumbung pangan masyarakat ( LPM ). Artinya cadangan pangan perlu ditingkatkan dengan penguatan lumbungan pangan masyarakat.
4. Dari aspek distribusi pangan , tidak stabilnya harga pangan yang sangat mempengaruhi inflasi daerah.
5. Dari aspek konsumsi pangan, masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang B2SA ( beragam, bergizi, seimbang dan aman ) yang di indikasikan dengan peningkatan skor PPH konsumsi . Skor PPH konsumsi tahun 2017 dengan nilai 88 dari skor ideal adalah 100. Ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya konsumsi pada jenis bahan pangan yang bersumber dari umbi-umbian ,sayur dan buah serta beberapa rumah tangga masih adanya keterbatasan mengkonsumsi pangan hewani.
6. Dari aspek keamanan pangan , belum optimal pengawasan terhadap keamanan pangan. Tahun 2017 pengawasan keamanan pangan segar baru mencapai 75 % berdasarkan sampel pangan segar yang diuji dengan rapid tes kit . Artinya Masih terdapatnya cemaran biologis, kimia atau benda lain pada pangan segar yang beredar di masyarakat sehingga dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia. Pemerintah Daerah bekerjasama sama dengan BPOM telah melakukan kerjasama dalam upaya menurunkan tingkat peredaran produk makanan yang tidak aman dikonsumsi guna mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dicanangkan **Visi** Pembangunan Kabupaten Buleleng yaitu ” **TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**”. Visi pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang



sistematis bagi penyelenggara pemerintah Kabupaten Buleleng dan segenap pemangku kepentingan.

Misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 yang terkait urusan Ketahanan Pangan adalah **Misi 1 ( pertama )** yaitu: **“MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF “** dan **tujuan pertama** yaitu : **“ Pertumbuhan ekonomi yang inklusif “** . Dalam mewujudkan Misi Ke 1 ( pertama ) dan Tujuan ke 1 ( pertama ) tersebut , maka program pembangunan urusan wajib pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, 2) Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan, 3) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan 4) Program Pengembangan Keamanan Pangan. Untuk mendukung Visi dan Misi dan Program Bupati terpilih maka tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan hal dimaksud adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan, dengan fungsi : 1) perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan, 2) pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan, 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan Pangan, 4) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan 5) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati .

Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dalam lima tahun kedepan berusaha mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati/Wakil Bupati, akan ditemui faktor-faktor penghambat serta faktor-faktor pendorong yang akan mempengaruhinya . Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.1

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : <b>TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA , DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong



	Misi 1 : Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif			
1	Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Kinerja petugas belum optimal	Pelatihan yang terintegrasi
2	Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Harga bahan pangan masih fluktuatif	Harga Pembelian Pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah adanya program peningkatan produksi pangan</li> <li>- Ketersediaan komoditas pangan surplus</li> </ul>
3	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman	Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Program Pengembangan Keamanan Pangan	Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan yang serius	Pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri pangan aman masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi keamanan pangan</li> <li>- Tersedianya alat uji ( rapid tes kid )</li> </ul>



Belum optimalnya pelaporan sistem kewaspadaan pangan dan gizi yang didalamnya memuat peta kerawanan pangan dan gizi yang di karenakan kinerja SDM belum optimal sebagai fator penghambat namun faktor pendorongnya adalah perlu adanya pelatihan yang terintegrasi sehingga desa mandiri pangan dan desa aman pangan dapat terwujud.

Harga bahan pangan sampai saat ini masih fluktuatif sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi dalam rangka stabilisasi harga dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) namun HPP tersebut masih terbatas pada komoditas pangan tertentu, ini merupakan permasalahan dan faktor penghambat. Namun faktor pendorongnya adalah ketersediaan pangan Kabupaten Buleleng yang selalu surplus .

Permasalahan karena pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi seimbang dan aman (skor PPH Tahun 2017 : 88 ) faktor penghambatnya adalah Konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) sehingga perlu didukung program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) . Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius faktor penghambatnya adalah pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri pangan aman sehingga perlu didukung program sosialisasi keamanan pangan pada masyarakat sampai rumah tangga, dengan faktor pendorong tersedianya keanekaragaman pangan lokal yang beragamam sehingga diharapkan pola konsumsi masyarakatat yang B2SA ( beragam, bergizi, seimbang dan aman ) dapat segera terwujud.

### 3.3 Telaah Renstra K/L

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2015 – 2109, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian RI menyusun Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2015 – 2019. Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementarian Pertanian RI Tahun 2015 – 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan. Tahun 2015 – 2019 Badan Ketahanan Pangan melaksanakan **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**. Program tersebut dilaksanakan dengan 4 (empat) kegiatan utama, yaitu

1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan,
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan,
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan,
4. Serta Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.



Program dan kegiatan strategis lingkup BKP Pertanian RI tahun 2015 – 2019 , antara lain: (1) Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, (2) Peningkatan Pengawasan Pangan Segar, (3) Toko Tani Indonesia (TTI), (4) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, (5) Penguatan Kapasitas Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah, (6) Penguatan Kapasitas Produksi Masyarakat melalui Kawasan Mandiri Pangan, dan (7) Penanganan Kerawanan Pangan Kronis dan Transien.

Dalam rangka ikut mendukung pembangunan nasional, Badan Ketahanan Pangan Pertanian RI mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu: “Terwujudnya ketahanan pangan melalui penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan” Dalam rangka memainkan peran tersebut sehingga dapat mencapai visi yang telah ditetapkan maka Badan Ketahanan Pangan Pertanian RI mengemban misi tahun 2015-2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
2. Memantapkan penanganan kerawanan pangan;
3. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok;
4. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
5. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Target kinerja “Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat” Badan Ketahanan Pangan Pertanian RI tahun 2015-2019, adalah:

1. Tercapainya kualitas ketersediaan pangan sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan sebesar 96,32 pada tahun 2019;
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1% setiap tahun;
3. Stabilitasnya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/Kg) diatas atau sama dengan HPP;
4. Stabilitasnya harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen dengan Coefficient of Variation maksimum 5%;
5. Meningkatnya keragaman konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG);
6. Meningkatnya pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif dengan terpenuhinya konsumsi sesuai AKG;





7. Meningkatnya konsumsi pangan yang sehat dan aman sehingga mencapai skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,5 pada tahun 2019;
8. Tercapainya keamanan pangan segar dengan kandungan cemaran biologis, kimia, dan fisik pada pangan segar (dibawah ambang batas).

Tabel : 3.2

Target Kinerja Program (IKP) Badan Ketahanan Pangan Kementerian  
Pertanian RI Tahun 2015–2019

No	Rincian IKP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Skor PPH Ketersediaan	87,52	89,71	92,04	94,25	96,32
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	1	1	1	1	1
3	Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP	≥ HPP
4	Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%	CV<5%
5	Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150
6	Konsumsi Protein(gram/kap/hr)	65,1	56,4	56,6	56,8	57,0
7	Skor PPH Konsumsi	84,1	86,2	88,4	90,5	92,5
8	Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi	81	160	245	330	400

Sumber : Badan Ketahanan Pangan RI

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dan sesuai tugas pokok fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. Dengan sasaran tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng memiliki peluang untuk mendapatkan

dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Faktor penghambat ataupun faktor pendorong ditinjau dari renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian merupakan potensi dan tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Secara umum masih cukup tersedia potensi sumberdaya alam dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan produksi pangan yang berkelanjutan. Sedangkan dari kapasitas sumberdaya manusia dan sumberdaya teknologi, memiliki potensi untuk ditingkatkan, untuk mendukung pengembangan ketersediaan dan distribusi pangan serta perbaikan konsumsi pangan. Di sisi lain, penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat berpeluang semakin besar untuk mendorong pencapaian sasaran program ketahanan pangan masyarakat/rumah tangga.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra Kementerian dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan Pertanian RI sebagaimana telah diuraikan pada sub bab diatas, dapat dilihat keterkaitan kinerja antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel : 3.3

Komposisi Capaian Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buleleng Terhadap Sasaran Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI

No	Indikator Kinerja	Capaian Renstra DKP Kab. Buleleng	Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI
1	Skor PPH Ketersediaan	74,48	92,04
2	Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan (%)	-	1
3	Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) ditingkat produsen	≥ HPP	≥ HPP
4	Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV < 5%	CV < 5%
5	Konsumsi Energi(kkal/kap/hr)	2.096	2.077
6	Konsumsi Protein(gram/kap/hr)	51	56,6
7	Skor PPH Konsumsi	88	88,4
8	Jumlah pengawas keamanan pangan segar yang tersertifikasi	-	245



### 3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS )

Dari proses KLHS dirumuskan 19 Isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Buleleng meliputi 5 isu-isu lingkungan hidup, 7 isu-isu ekonomi dan 7 isu-isu sosial budaya yaitu sebagai berikut :

#### I. Isu Strategis Lingkungan Hidup

1. Menurunnya kondisi daerah aliran sungai ( DAS)
2. Pencemaran lingkungan oleh air limbah
3. Buruknya sanitasi lingkungan , terutama karena pengelolaan persampahan yang belum optimal
4. Kerusakan ekosistem laut, terutama terumbu karang dan padang lamun
5. Ancaman perubahan iklim

#### II. Isu Strategis Ekonomi

1. Rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat , terutama generasi muda
2. Daya saing UMKM masih rendah
3. Kondisi ekonomi perdesaan belum mampu mencegah migrasi tenaga kerja produktif ke wilayah perkotaan ataupun keluar daerah
4. Pendapatan perkapita penduduk masih rendah dan belum merata
5. Iklim investasi belum kondusif
6. Kondisi infrastruktur kawasan strategis belum optimal
7. Kesenjangan ekonomi antar wilayah perdesaan dan kecamatan masih tinggi

#### III. Isu Strategis Sosial Budaya

1. Lunturnya kearifan lokal karena meningkatnya pengaruh budaya asing
2. Pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi dan persebaran penduduk tidak merata
3. Kemiskinan dan pengangguran
4. PMKS dan pelayanan sosial
5. Pelestarian budaya
6. Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal
7. Mutu dan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan

Dan dari hasil kajian didapatkan 15 Program prioritas yang berpotensi memiliki dampak/resiko terhadap lingkungan hidup, seluruhnya diperkirakan memiliki pengaruh/dampak negatif terhadap isu-isu pembangunan berkelanjutan . Dari 15 Program Prioritas yang terindikasi mempengaruhi isu – isu pembangunan berkelanjutan program urusan ketahanan pangan tidak termasuk di dalamnya. Artinya dari hasil



ringkasan KLHS tidak ada implikasi terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, keamanan pangan, pemanfaatan sumber daya pangan lokal dan kearifan lokal penanggulangan kemiskinan bisa teratasi dan tidak menutup kemungkinan penyebab kemiskinan yang lain adalah seperti faktor alam dan kultural. Perumusan isu strategis untuk 5 tahun kedepan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika pembangunan ketahanan pangan yang terjadi pada lingkungan eksternal, kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Berikut identifikasi isu-isu strategis tersebut dari berbagai sumber antara lain :

#### **3.5.1 Identifikasi Isu-Isu Strategis Nasional**

Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2015-2019 memuat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (1,39%/tahun) mengakibatkan kebutuhan pangan terus meningkat.
2. Alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non-pertanian yang terjadi secara masif.
3. Ketersediaan air cenderung makin berkurang akibat terjadinya kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan.
4. Kurangnya investasi bagi pengembangan infrastruktur terutama di perdesaan serta terbatasnya prasarana usaha tani yang sangat dibutuhkan masyarakat.
5. Fluktuasi harga pangan yang ditunjukkan oleh Coefficient of Variation (cv) perlu diantisipasi karena nilai cv yang tinggi mencerminkan harga jual pangan sangat fluktuatif sehingga mempengaruhi inflasi
6. Telah terjadi beberapa kasus keracunan dan gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dari cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya
7. Kemampuan manajemen ketahanan pangan nasional dan daerah yang merupakan pendorong dan penggerak dalam pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan tingkat nasional hingga rumah tangga dan individu masih belum optimal



### 3.5.2 Identifikasi isu-isu Strategis Provinsi Bali

Isu-isu strategis tingkat Provinsi Bali sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang masih tinggi akibat tingginya arus migrasi dari luar bali , perpindahan penduduk dari kabupaten lain ke Kabupaten Badung dan Kota Denpasar
2. Proporsi rumah tangga termiskin hingga saat ini masih berada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng
3. Penurunan potensi sumber daya air, adanya kerusakan daerah aliran sungai (DAS)
4. Alih fungsi lahan sawah yang terjadi di bali rata-rata sekitar 0,5 % pertahun, dari lahan sawah produktif ke penggunaan non pertanian ( pemukiman, gudang, komplek Ruko, Usaha Jasa Periwisata ) yang menyebabkan penyempitan lahan pertanian tanaman pangan
5. Kelestarian sumber daya air untuk tanaman pangan cenderung mengalami gangguan akibat bekurangnya daerah tangkapan air
6. Kondisi iklim yang tidak menentu menyebabkan terjadinya pergeseran penanaman , panen, gangguan produksi dan terjadinya banjir, longsor dan kekeringan
7. Sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana masih lemah
8. Tingkat konsumsi beras masih relatif masih tinggi yaitu sekita 116 kg/kapita /tahun dengan tingkat diversifikasi pangan masih relatif rendah
9. Belum berkembangnya teknologi pengolahan pangan berbasis tepung umbi – umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
10. Masih ada beberapa kasus penggunaan bahan tambahan pangan seperti pengawet, pewarna, pengental yang berbahaya bagi kesehatan

### 3.5.3 Identifikasi Isu-Isu Strategis Wilayah Tetangga ( Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem ) secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi
2. Masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan beras
3. Alih fungsi lahan yang tidak bisa dikendalikan, sehingga menyebabkan penyempitan ruang tanam tanaman pangan
4. Kondisi iklim yang tidak menentu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran masa tanam dan panen seperti, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, letusan gunung merapi
5. Adanya gangguan terhadap daerah aliran sungai
6. Tingkat diversifikasi pangan masyarakat masih rendah



7. Masih adanya kasus-kasus keracunan makanan sehingga pengawasan keamanan pangan perlu di tingkatkan

#### 3.5.4 Isu Strategis Kabupaten Buleleng

Dengan menganalisis kondisi yang ada , mengacu pada berbagai referensi dan Visi , Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Kabupaten Buleleng sesuai dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan
2. Penyediaan sarana dan prasarana publik,infrastruktur jalan, air bersih dan Ruang Terbuka Hijau
3. Pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Revitalisasi sektor pertanian dalam arti luas
5. Peningkatan peluang investasi, akses peluang usaha dan kesempatan kerja yang seluas-luasnya
6. Peningkatan kualitas SDM dan penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal secara berkelanjutan
7. Penggunaan / penerapan teknologi informasi secara bijak
8. Tata kelola dan pengendalian tata ruang secara konsisten dengan penegakan hukum yang berkeadilan
9. Peningkatan upaya promotif dan preventif pencegahan penanganan HIV/AIDS
10. Peningkatan kemandirian fiskal daerah
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

3.5.5 Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan ditinjau dari Gambaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L , Isu strategis Provinsi Bali , Isu strategis dari Kabupaten tetangga ( Kabupaten Jembarana dan Kabupaten Karangasem ) dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, maka Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang berkembang saat ini adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian
2. Masih terdapatnya penduduk miskin di kabupaten buleleng
3. Tingkat ketergantungan masyarakat akan konsumsi pangan beras masih tinggi



4. Masih terjadinya fluktuasi harga pangan di tingkat pedagang sehingga akan mempengaruhi inflasi
5. Cadangan pangan daerah perlu di tingkatkan sehingga dapat difungsikan pada musim-musim paceklik dan atau kondisi darurat rawan pangan
6. Pola konsumsi masyarakat yang B2SA ( beragam, bergizi, seimbang dan aman ) masih relatif rendah sehingga perlu di lakukan percepatan penganekaragam konsumsi pangan yang salah satu strateginya adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk tanaman pangan keluarga dan memperbanyak model pengembangan pangan pokok lokal.
7. Belum berkembangnya teknologi pengolah pangan non beras/terigu
8. Keanekaragaman pangan lokal yang tersebar di kabupaten buleleng belum serius di garap/dikelola sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah baik dari segi cara mengolah, mengemas dan memasarkannya sehingga bisa bersaing dengan produk-produk olahan pangan dari luar
9. Masih adanya kasus-kasus keracunan makanan akibat adanya penambahan bahan pangan seperti pengawet, pewarna,yang dapat membahayakan kesehatan bagi manusia sehingga diperlukan pengawasan keamanan pangan yang berkelanjutan.



## BAB. IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam upaya mendukung pencapaian VISI dan MISI Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, dimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng mendukung dari Misi pertama yaitu : ***Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif***. Dari misi tersebut maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

##### **Tujuan :**

**“ Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Mantap Berbasis Pangan Lokal “**

Tujuan diatas mengandung makna sebagai berikut :

**Ketahanan Pangan** : Kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat sampai dengan rumah tangga , yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

**Mantap** : Kuat, Tidak goyah, tidak ada gangguan, keadaan yang stabil

**Pangan Lokal** : Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka **sasaran** yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan
2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat





Dengan indikator sasaran sebagai berikut :

**Sasaran 1** : Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan

**Indikatornya** : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan  
2. Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten

**Sasaran 2** : Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat

**Indikatornya** : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Program yang dilaksanakan kurun waktu 5 Tahun kedepan dalam mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Program
<b>Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Mantap Berbasis Pangan Lokal</b>	1. Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	1. Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan 2. Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan 3. Program Pengembangan Keamanan Pangan
	2. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	1. Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berikut disampaikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022 seperti pada tabel di bawah ini .

Tabel : 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten  
Buleleng Tahun 2017 – 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Mantap Berbasis Pangan Lokal	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Nilai	74,48	75	76	77	78	79	79
			Jumlah cadangan pangan kabupaten	Ton / tahun	75.960	75.962	75.964	75.968	75.972	75.976	75.976
		Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Nilai	88	91	93	95	97	98	98

## BAB. V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komperhensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun mendatang seperti tabel berikut :

Tabel : 5.1

Tujuan , Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan  
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

VISI	<b>: TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA</b>
MISI 1	<b>: Memantapkan Pembangunan Ekonomi Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif</b>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<b>Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Mantap Berbasis Pangan Lokal</b>	1. Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan melalui koordinasi sinergi lintas sektor dalam penyediaan pangan	1. Pemantapan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		2. Penguatan cadangan pangan Pemerintah dan masyarakat	1. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa
		3. Mendorong terwujudnya distribusi pangan yang merata dan terjangkau untuk menjamin stabilitas dan keamanan pasokan dan harga pangan ditingkat rumah tangga	1. Pengembangan distribusi pangan yang merata, harga stabil dan terjangkau (aksesibilitas) dengan mendorong dan mendukung upaya peningkatan daya beli
		4. Mendorong peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, stabilisasi harga dan akses pangan;	1. Meningkatkan akses pangan melalui pengembangan sistem distribusi yang efektif dan efisien
			2. Mengembangkan lembaga distribusi pangan masyarakat
			3. Menjaga stabilitas Harga Pangan
		5. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	1. Pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2. Mewujudkan sertifikasi pangan segar
		6. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat	1. Kerjasama dan informasi keamanan pangan
	2. Meningkatnya penganeekaragaman konsumsi pangan masyarakat	1. Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;	1. Meningkatkan diversifikasi pangan melalui pemanfaatan pangan lokal non beras, non terigu
			2. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis bahan baku pangan lokal
			3. Meningkatkan model pengembangan pangan pokok lokal
		2. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta	1. Pengembangan industri pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan promosi penganeekaragaman konsumsi pangan



## BAB. VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi (Tupoksi) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng.

Kegiatan peningkatan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

#### 6.1 Program dan Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng

Program-program pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022 meliputi 9 Program, yaitu

##### I. Program Teknis :

- 1) Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan kegiatan :
  - a. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
  - b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan
  - c. Dewan Ketahanan Pangan
  - d. Penyusunan data base potensi produk pangan
  - e. Adhikarya Pangan Nusantara (APN)
  - f. Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
  - g. Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)

##### **Indikator kinerja program :**

1. Jumlah tingkat ketersediaan pangan beras

2. Jumlah tingkat ketersediaan energi
3. Jumlah tingkat ketersediaan protein
- 2) Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan
  - a. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok
  - b. Pengembangan cadangan pangan daerah
  - c. Pengembangan lumbung pangan desa
  - d. Pengembangan model distribusi pangan yang efisien
  - e. Pengembangan sistem informasi pasar
  - f. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

***Indikator kinerja program :***

1. Harga pangan gabah/beras 15% di atas HPP
2. Nilai koefisien keragaman beras (CV) di bawah 5%
3. Jumlah cadangan pangan masyarakat
- 3) Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - a. Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga
  - b. Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman
  - c. Penyusunan pola pangan harapan
  - d. Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal
  - e. Pengembangan pangan pokok lokal

***Indikator kinerja program :***

1. Jumlah tingkat konsumsi pangan beras
2. Jumlah tingkat konsumsi pangan hewani
3. Jumlah tingkat konsumsi energi
4. Jumlah tingkat konsumsi protein
- 4) Program Pengembangan Keamanan Pangan
  - a. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
  - b. Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar
  - c. Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan
  - d. Pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan segar

***Indikator kinerja program :***

1. Persentase pangan aman

**II. Program Penunjang :**

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
  - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah
  - l. Penyediaan jasa administrasi kepegawaian
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - b. Pengadaan mebeleur
  - c. Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
  - g. Pendataan dan Inventarisasi aset barang milik daerah
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5) Program Perencanaan Anggaran SKPD
- a. Penyusunan anggaran SKPD

Kegiatan utama pada program-program Penunjang meliputi: operasional pelayanan kantor, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peningkatan SDM aparatur, serta pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah.

## 6.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran atas pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga miskin



2. Gapoktan dan poktan
3. Para ibu – ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK
4. Kelompok pengolah olahan pangan lokal
5. Kelompok wanita tani (KWT)
6. Tenaga penyuluh pertanian
7. Kantin sekolah
8. Pasar tradisional
9. Pedagang besar, pedagang eceran dan penggilingan padi
10. Lembaga distribusi pangan , kelompok pengembang usaha pangan masyarakat dan toko tani indonesia
11. Desa Mandiri Pangan

### **6.3 Rencana Program dan Pendanaan Indikatif**

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :



TABEL : 6.3  
RENCANA PROGRAM,KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017 - 2022

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT YANG MANTAP BERBASIS PANGAN LOKAL	1 Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	1.02.03.01 19	1 Program Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah tingkat ketersediaan pangan beras	114 kg/kapita/tahun	122 kg/kapita/th	578,000,000	124 kg/kapita/th	634,799,000	126 kg/kapita/th	814,500,000	128 kg/kapita/th	1,016,000,000	130 kg/kapita/th	1,061,000,000	130 kg/kapita/th	4,104,299,000	Kab.Bul eleng
				Jumlah tingkat Ketersediaan energi	3,186 kkal/kapita/hari	3.186 kkal/kapita/hari		3.186 kkal/kapita/hari		3.197 kkal/kapita/hari		3.197 kkal/kapita/hari		3.197 kkal/kapita/hari		3.197 kkal/kapita/hari		
				Jumlah tingkat Ketersediaan protein	75.82 gram/kapita/hari	75,82 gram/kapita/hari		75,82 gram/kapita/hari		75,85 gram/kapita/hari		75,85 gram/kapita/hari		75,85 gram/kapita/hari		75,85 gram/kapita/hari		
				KASI KETERSEDIAAN PANGAN														
		1.02.03.01 19,001	1 Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa mandiri pangan	- desa	2 desa	87,600,000	2 desa	114,399,000	4 desa	229,500,000	6 desa	350,000,000	8 desa	395,000,000	22 desa	1,176,499,000	Kab.Bule leng
		1.02.03.01 19,002	2 Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Jumlah dokumen laporan ketersediaan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dok	1 dok	98,900,000	1 dok	98,900,000	1 dok	110,000,000	1 dok	116,000,000	1 dok	116,000,000	1 dok	539,800,000	Kab.Bule leng
		1.02.03.01 19,003	3 Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah laporan dewan ketahanan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	-	1 dok	91,000,000	1 dok	91,000,000	1 dok	95,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	477,000,000	Kab.Bule leng
				KASI SUMBER DAYA PANGAN														
		1.02.03.01 19,004	4 Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah dokumen data base potensi produk pangan lokal yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dok	1 dok	72,500,000	1 dok	72,500,000	1 dok	85,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	430,000,000	Kab.Bule leng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 19,005	5 Adhikarya Pangan Nusantara (APN)	Jumlah kelompok tani yang berprestasi	- kelompok	1 kelompok	80,000,000	1 kelompok	80,000,000	1 kelompok	90,000,000	1 kelompok	120,000,000	1 kelompok	120,000,000	5 kelompok	490,000,000	Kab.Buleleng
				KASI KERAWANAN PANGAN														
		1.02.03.01 19,006	6 Penyusunan Data Kerawanan dan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah dokumen data kerawanan pangan dan gizi yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok.	78,000,000	1 dok.	78,000,000	1 dok.	85,000,000	1 dok.	100,000,000	1 dok.	100,000,000	1 dok.	441,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 19,007	7 Analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan ( Peta FSVA )	Jumlah dokumen analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	- dokumen	1 dok.	70,000,000	1 dok.	100,000,000	1 dok.	120,000,000	1 dok.	130,000,000	1 dok.	130,000,000	1 dok.	550,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 16	2 Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan	Harga pangan gabah/beras 15% di atas HPP	≥ HPP	≥ HPP	536,000,000	≥ HPP	1,009,000,000	≥ HPP	1,128,000,000	≥ HPP	1,250,000,000	≥ HPP	1,455,000,000	≥ HPP	5,378,000,000	Kab.Bulieleng
				Nilai koefisien keragaman beras (CV) di bawah 5%	CV < 5%	CV <5%		CV <5%		CV <5%		CV <5%		CV <5%		CV <5%		
				Jumlah cadangan pangan masyarakat	75,760 ton/th	75.762 ton/th		75.764 ton/th		75.768 ton/th		75.772 ton/th		75.776 ton/th		75.776 ton/th		
				SEKSI HARGA PANGAN														
		1.02.03.01 16,002	1 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok	Jumlah dokumen laporan hasil pemantauan akses harga pangan pokok yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok	76,800,000	1 dok	78,000,000	1 dok	80,000,000	1 dok	90,000,000	1 dok	100,000,000	1 dok	424,800,000	Kab.Buleleng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 16.006	2 Pengembangan sistem informasi pasar	Jumlah dokumen laporan informasi harga komoditas pangan strategis yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok	65,800,000	1 dok	67,000,000	1 dok	78,000,000	1 dok	79,000,000	1 dok	90,000,000	1 dok	379,800,000	Kab.Buleleng
				SEKSI CADANGAN PANGAN														
		1.02.03.01 16.003	3 Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah dokumen informasi cadangan pangan daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok	72,600,000	1 dok	74,000,000	1 dok	95,000,000	1 dok	106,000,000	1 dok	125,000,000	1 dok	472,600,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 16.004	4 Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah lumbung pangan masyarakat (LPM) yang aktif	12 LPM	12 LPM	156,000,000	14 LPM	600,000,000	16 LPM	630,000,000	18 LPM	700,000,000	20 LPM	800,000,000	20 LPM	2,886,000,000	Kab.Buleleng
				SEKSI DISTRIBUSI PANGAN														
		1.02.03.01 16.005	5 Pengembangan model distribusi pangan yang efesien	Jumlah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang aktif	4 LDPM	4 LDPM	105,800,000	4 LDPM	120,000,000	4 LDPM	165,000,000	4 LDPM	190,000,000	4 LDPM	250,000,000	4 LDPM	830,800,000	Kab.Buleleng
				Jumlah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat ( PUPM ) yang aktif	2 LUPM	3 LUPM		4 LUPM		5 LUPM		6 LUPM		7 LUPM		7 LUPM		
				Jumlah Toko Tani Indonesia ( TTI ) yang aktif	10 TTI	12 TTI		13 TTI		14 TTI		15 TTI		16 TTI		16 TTI		
		1.02.03.01 16.008	6 Pemantauan dan analisis akses pagan masyarakat	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok	59,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	80,000,000	1 dok	85,000,000	1 dok	90,000,000	1 dok	384,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 18	3 Program Pengembangan Keamanan Pangan	Persentase pangan aman	75 %	75%	586,000,000	75%	614,000,000	80%	817,000,000	80%	1,041,000,000	85%	1,100,000,000	85%	4,158,000,000	Kab.Bul eleng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
				SEKSI PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN														
		1.02.03.01 18.001	1 Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah sample pangan yang di uji	20 sample	80 sample	210,000,000	100 sample	220,000,000	100 sample	277,000,000	100 sample	341,000,000	100 sample	315,000,000	100 sample	1,363,000,000	Kab.Buleleng
				SEKSI KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN														
		1.02.03.01 18.003	2 Pengembangan Sertifikasi Pangan Segar	Jumlah pangan segar yang tersertifikasi	- pangan segar	2 pangan segar	137,000,000	3 pangan segar	137,000,000	6 pangan segar	200,000,000	10 pangan segar	300,000,000	12 pangan segar	350,000,000	33 pangan segar	1,124,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 18.005	3 Pendampingan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan Segar	Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya tentang sertifikasi dan registrasi pangan segar	6 kelompok	25 kelompok	69,000,000	25 kelompok	69,000,000	30 kelompok	90,000,000	35 kelompok	100,000,000	40 kelompok	120,000,000	40 kelompok	448,000,000	Kab.Buleleng
				SEKSI KERJASAMA DAN INFORMASI KEAMANAN PANGAN														
	1.02.03.01 18.004	4 Pengembangan Jejaring Keamanan Pangan	Jumlah sekolah dan pasar yang meningkat pemahamannya di bidang keamanan pangan	9 sekolah  2 pasar	15 sekolah  4 pasar	170,000,000	20 sekolah  6 pasar	188,000,000	25 sekolah  8 pasar	250,000,000	30 sekolah  10 pasar	300,000,000	35 sekolah  12 pasar	315,000,000	35 sekolah  12 pasar	1,223,000,000	Kab.Buleleng	
2 Meningkatkan pangane karagaman konsumsi pangan masyarakat	1.02.03.01 17	1 Program Pengembangan Pangane karagaman Konsumsi Pangan	Jumlah tingkat konsumsi pangan beras	108 kg/kapita/th	109 kg/kapita/th	1,898,000,000	110 kg/kapita/th	1,734,500,000	111 kg/kapita/th	1,879,200,000	112 kg/kapita/th	2,012,500,000	113 kg/kapita/th	2,187,500,000	113 kg/kapita/th	9,711,700,000	Kab.Bulieleng	
			Jumlah tingkat konsumsi pangan hewani	34 kg/ kapita / tahun	35 kg/ kapita / tahun		36 kg/ kapita / tahun		37 kg/ kapita / tahun		38 kg /kapita / tahun		39 kg /kapita / tahun		39 kg /kapita / tahun			
			Jumlah tingkat konsumsi energi	2,096 kkal / kapita / hari	2.107 kkal / kapita / hari		2.118 kkal / kapita / hari		2.118 kkal / kapita / hari		2.119 kkal / kapita / hari		2.120 kkal / kapita / hari		2.120 kkal / kapita / hari			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
				Jumlah tingkat konsumsi protein	51 gram / kapita / hari	52 gram / kapita / hari		53 gram / kapita / hari		54 gram / kapita / hari		55 gram / kapita / hari		56 gram / kapita / hari		56 gram / kapita / hari		
				SEKSI KONSUMSI PANGAN														
		1.02.03.01 17.001	1 Pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga	Jumlah rumah tangga yang aktif mengembangkan tanaman pangan keluarga pada pekarangan rumah	134 RT	19.092 RT	1,188,000,000	19.092 RT	700,000,000	19.092 RT	771,200,000	19.092 RT	830,000,000	19.092 RT	887,500,000	19.092 RT	4,376,700,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 17.003	2 Penyusunan Pola Pangan Harapan	Jumlah sampel rumah tangga yang menerapkan pola konsumsi yang B2SA	100 RT	180 RT	93,000,000	270 RT	95,000,000	270 RT	117,000,000	270 RT	120,000,000	270 RT	150,000,000	1260 RT	575,000,000	Kab.Buleleng
				Jumlah dokumen analisis pola pangan harapan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok.		1 dok.		1 dok.		1 dok.		1 dok.		1 dok.		
				SEKSI PROMOSI PENGANEKARAGAMA N KONSUMSI PANGAN														
		1.02.03.01 17.002	3 Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman	Jumlah kelompok wanita yang berprestasi di bidang cipta menu dari bahan olahan non beras / terigu	3 kelompok	3 Klp	138,200,000	3 Klp	139,500,000	3 Klp	141,000,000	3 Klp	142,000,000	3 Klp	150,000,000	15 Klp	710,700,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 17.004	4 Penyebaran Informasi dan Promosi Produk Pangan Lokal	Jumlah kelompok wanita tani yang ikut pameran promosi pangan lokal non beras/terigu	8 KWT	18 KWT	402,000,000	18 KWT	300,000,000	18 KWT	300,000,000	18 KWT	300,000,000	18 KWT	300,000,000	18 KWT	1,602,000,000	Kab.Buleleng
				SEKSI PENGEMBANGAN PANGAN LOKAL														

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 17.007	4 Pengembangan pangan pokok lokal	Jumlah kelompok tani yang meningkat pemahamannya di bidang pengembangan pangan pokok lokal	- kelompok	4 kelompok	76,800,000	6 kelompok	500,000,000	8 kelompok	550,000,000	10 kelompok	620,500,000	12 kelompok	700,000,000	40 kelompok	2,447,300,000	Kab.Buleleng
Urusan Pangan				JUMLAH I			3,598,000,000		3,992,299,000		4,638,700,000		5,319,500,000		5,803,500,000		23,351,999,000	
Urusan Penunjang																		
Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terhadap publik	Pelayanan administrasi perkantoran terhadap publik semakin baik	1.02.03.01 01	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal demi kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100 persen	100%	1,167,100,000	100%	1,234,600,820.63	100%	1,245,822,658.42	100%	1,254,006,506.30	100%	1,337,736,433.59	100%	6,239,266,418.94	Kab.Bul eleng
		1.02.03.01 01.001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk yang teregistrasi dengan baik	912 pucuk surat	2150 pucuk surat	70,400,000	1000 pucuk surat	75,000,000	1000 pucuk surat	78,500,000	1000 pucuk surat	78,500,000	1000 pucuk surat	80,000,000	1000 pucuk surat	382,400,000	Kab.Buleleng
				Surat keluar yang teregistrasi dengan baik	1532 pucuk surat	2150 pucuk surat		1600 pucuk surat		1700 pucuk surat		1800 pucuk surat		1900 pucuk surat		1900 pucuk surat		
		1.02.03.01 01.002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	54,800,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	65,000,000	12 bulan	67,000,000	12 bulan	306,800,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 01.003	3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kendaraan operasional Kepala Dinas dan Sekretaris yang disediakan	2 unit	2 unit	179,200,000.00	2 unit	179,800,820.63	2 unit	179,522,658.42	2 unit	179,706,506.30	2 unit	203,936,433.59	2 unit	922,166,418.94	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 01.006	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang layak jalan	9 unit	17 unit	40,000,000	20 unit	45,000,000	24 unit	49,000,000	27 unit	53,000,000	31 unit	65,000,000	34 unit	252,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 01.007	5 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dok.	1 dok.	313,600,000	1 dok.	320,000,000	1 dok.	326,000,000	1 dok.	335,000,000	1 dok.	345,000,000	1 dok.	1,639,600,000	Kab.Buleleng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 01.008	6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	103,600,000	12 bulan	108,000,000	12 bulan	112,000,000	12 bulan	112,000,000	12 bulan	112,000,000	12 bulan	547,600,000	Kab.Bule leng
		1.02.03.01 01.012	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan selama 1 tahun	11 jenis	11 jenis	3,000,000	11 jenis	3,000,000	11 jenis	3,000,000	11 jenis	3,000,000	11 jenis	3,000,000	11 jenis	15,000,000	Kab.Bule leng
		1.02.03.01 01.013	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang di adakan	83 unit	17 unit	50,500,000	8 unit	65,000,000	7 unit	58,000,000	6 unit	48,000,000	6 unit	56,000,000	44 unit	277,500,000	Kab.Bule leng
				- komputer PC	30 unit	1 unit		2 unit		2 unit				1 unit		6 unit		
				- printer	24 unit	3 unit		2 unit		2 unit		2 unit		1 unit		10 unit		
				- laptop	10 unit	1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		1 unit		8 unit		
				- ac	17 unit	5 unit							2 unit		7 unit			
				- LCD proyektor	1 unit	1 unit					1 unit				2 unit			
				- Kipas angin	unit	4 unit									4 unit			
				- kamera	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit		
				- Scaner	unit			1 unit							1 unit			
		- TOA	unit	1 unit									1 unit					
		1.02.03.01 01.015	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan penyediaan media informasi media cetak	12 bulan	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	5,000,000	12 bulan	6,000,000	12 bulan	26,000,000	Kab.Bule leng
		1.02.03.01 01.017	10 Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	12 bulan	12 bulan	51,800,000	12 bulan	51,800,000	12 bulan	51,800,000	12 bulan	51,800,000	12 bulan	51,800,000	12 bulan	259,000,000	Kab.Bule leng
		1.02.03.01 01.018	11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	Jumlah penugasan rapat dalam daerah dan keluar daerah yang di hadiri	60 kali	74 kali	224,200,000	74 kali	250,000,000	74 kali	250,000,000	74 kali	250,000,000	74 kali	275,000,000	74 kali	1,249,200,000	Kab.Bule leng



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 01.022	12 Penyediaan jasa administrasi kepegawaian	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	12 bulan	71,000,000	12 bulan	72,000,000	12 bulan	73,000,000	12 bulan	73,000,000	12 bulan	73,000,000	12 bulan	362,000,000	Kab.Buleleng
Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Memadai dan Berfungsi Dengan Baik	Aparatur Pemerintah Bekerja dengan Profesional	1.02.03.01 02	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100 persen	100%	353,275,930	100%	909,800,000	100%	704,000,000	100%	509,500,000	100%	435,500,000	100%	2,912,075,930	Kab.Bul eleng
		1.02.03.01 02.005	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional kantor yang diadakan	17 unit	3 unit	60,000,000	4 unit	560,000,000	4 unit	360,000,000	3 unit	60,000,000	2 unit	40,000,000	16 unit	1,080,000,000	Kab.Buleleng
				- kendaraan roda dua	13 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		2 unit		14 unit		
				- kendaraan roda empat	4 unit			1 unit		1 unit				2 unit				
		1.02.03.01 02.010	2 Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur kantor yang diadakan	58	20 unit	15,000,000	26 unit	42,000,000	8 unit	27,000,000	5 unit	22,500,000	7 unit	23,500,000	66 unit	130,000,000	Kab.Buleleng
				- meja kerja	91 unit	10 unit		10 unit							20 unit			
				- kursi kerja	162 unit	10 unit		10 unit							20 unit			
				- lemari kaca	unit					2 unit				2 unit		4 unit		
		- Filling kabinet	- unit			6 unit		6 unit		5 unit		5 unit		22 unit				
		1.02.03.01 02.012	3 Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara	Cakupan pengadaan sarana/prasarana upacara keagamaan	12 bulan	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	285,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 02.022	4 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Gedung / kantor yang layak	1 gedung	1 gedung	25,000,000	1 gedung	50,000,000	1 gedung	50,000,000	1 gedung	150,000,000	1 gedung	50,000,000	1 gedung	325,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 02.024	5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor secara berkala	12 bulan	16 unit	59,800,000	19 unit	59,800,000	22 unit	65,000,000	25 unit	65,000,000	27 unit	80,000,000	27 unit	329,600,000	Kab.Buleleng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 02.026	6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor secara berkala	12 bulan	50 unit	25,000,000	50 unit	25,000,000	50 unit	25,000,000	50 unit	30,000,000	50 unit	50,000,000	50 unit	155,000,000	Kab.Buleleng
		1.02.03.01 02.045	7 Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan aset barang milik daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dok	113,475,930	1 dok	118,000,000	1 dok	122,000,000	1 dok	122,000,000	1 dok	132,000,000	1 dok	607,475,930	Kab.Buleleng
Aparatur pemerintahan mematuhi aturan yang berlaku	Aparatur disiplin serta mematuhi aturan yang berlaku	1.02.03.01 03	1 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100 persen	100%	63,430,000	100%	64,000,000	100%	65,000,000	100%	66,000,000	100%	85,000,000	100%	343,430,000	Kab.Bul eleng
		1.02.03.01 03.005	1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian kantor selama 1 tahun	93 stel	135 stel	63,430,000	135 stel	64,000,000	135 stel	65,000,000	135 stel	66,000,000	135 stel	85,000,000	135 stel	343,430,000	Kab.Buleleng
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Pelaporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	1.02.03.01 06	1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	100 persen	100%	96,400,000	100%	106,000,000	100%	116,600,000	100%	128,000,000	100%	150,800,000	100%	597,800,000	Kab.Bul eleng
		1.02.03.01 06.001	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang akuntabel dan disampaikan tepat waktu	9 dokumen	11 dok.	96,400,000	11 dok.	106,000,000	11 dok.	116,600,000	11 dok.	128,000,000	11 dok.	150,800,000	11 dok.	597,800,000	Kab.Buleleng
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran SKPD	Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang di susun tepat waktu	1.02.03.01 07	1 Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran perangkat daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100 persen	100%	130,000,000	100%	143,000,000	100%	157,000,000	100%	172,000,000	100%	200,200,000	100%	802,200,000	Kab.Bul eleng

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN , SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
						TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		
						TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	
		1.02.03.01 07.001	1 Penyusunan anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun akurat dan disampaikan tepat waktu	4 dokumen	4 dok.	130,000,000	4 dok.	143,000,000	4 dok.	157,000,000	4 dok.	172,000,000	4 dok.	200,200,000	4 dok.	802,200,000	Kab.Buleleng
Urusan Penunjang				JUMLAH II			1,810,205,930.00		2,457,400,820.63		2,288,422,658.42		2,129,506,506.30		2,209,236,433.59		10,894,772,348.94	
				JUMLAH TOTAL			5,408,205,930.00		6,449,699,820.63		6,927,122,658.42		7,449,006,506.30		8,012,736,433.59		34,246,771,348.94	

## BAB. VII

### INDIKATOR KINERJA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2017-2022

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 yang diamanatkan khususnya kepada Dinas Ketahanan Pangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng yang terkait dengan Ketahanan Pangan adalah misi ke 1 yaitu **“Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”**.

7.1 Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang akan dicapai dalam 5 tahun kedepan untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022 dapat dilihat seperti tabel di bawah ini :



Tabel : 7.1

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target /Th.					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Nilai	74,48	75	76	77	78	79	79
4.	Jumlah cadangan pangan kabupaten	Ton/tahun	75.960	75.962	75.964	75.968	75.972	75.976	455.804
5.	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Nilai	88	91	93	95	97	98	98
8.	Persentase Pangan aman	Persentase	75%	75%	75%	80%	80%	85%	85%

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini :



Tabel : 7.2

## Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan	Kondisi Awal ( 2017 )	Target Tahun ke				
					Alasan	Formula/cara pengukuran	Sumber Data			2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Yang Mantap Berbasis Pangan Lokal	Terjaganya ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau yang berbasis sumberdaya lokal secara berkelanjutan	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Nilai	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	Jumlah nilai skor PPH ketersediaan pada masing-masing kelompok bahan pangan	BPS, Data NBM	Pola pangan harapan berguna sebagai instrumen dalam menilai ketersediaan pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat dan digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman pangan . Semakin tinggi skor mutu pangan , menunjukkan situasi pangan	74,48	75	76	77	78	79

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan	Kondisi Awal ( 2017)	Target Tahun ke				
					Alasan	Formula/cara pengukuran	Sumber Data			2018	2019	2020	2021	2022
								yang semaki beragam dan semakin baik komposisinya dan mutu gizinya						
			Jumlah cadangan pangan Kabupaten	Ton / tahun	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan	Jumlah cadangan pangan bulog + jumlah cadangan pangan di penggilingan + jumlah cadangan pangan di LPM + Jumlah cadangan pangan di LDPM + Jumlah cadangan pangan di LUPM + Jumlah cadangan pangan di pasokan pedagang	Data cadangan pangan	cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.	75.960	75.962	75.964	75.968	75.972	75.976
		Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Nilai	Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun	Jumlah nilai skor PPH konsumsi pada masing-masing kelompok bahan pangan	BPS	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Komposisi kelompok	88	91	93	95	97	98

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan	Kondisi Awal ( 2017)	Target Tahun ke				
					Alasan	Formula/cara pengukuran	Sumber Data			2018	2019	2020	2021	2022
					2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal			pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi, berimbang dan aman						



## **BAB. VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan selama periode 5 (lima) Tahun.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, apalagi di era otonomi daerah, globalisasi, dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, semangat kedaulatan pangan dan kemandirian pangan harus tertanam dengan kokoh di setiap pelaku pembangunan ketahanan pangan agar diperoleh hasil yang optimal. Agar pembangunan ketahanan pangan berjalan optimal maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, dan adanya partisipasi masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang menyentuh masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan keluarga sampai tingkat perseorangan perlu diselaraskan dengan pembangunan ekonomi nasional, upaya pengentasan kemiskinan, dan responsif gender. Selanjutnya, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta kelembagaan ketahanan pangan yang kuat maka diharapkan akan mampu mengakomodasikan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal yang tersedia.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan dinamika kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan. Dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan serta mewujudkan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

